

TATA KELOLA BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR

RENALDI ANAS

105640195014



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

TATA KELOLA BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



RENALDI ANAS

105640195014

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

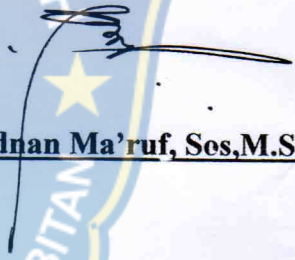
Judul Skripsi : Tata Kelola Bencana Banjir
Nama Mahasiswa : Renaldi Anas
Nomor Stambuk : 10564 01950 14
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Anwar Parawangi, M.Si


Adnan Ma'ruf, Sos., M.Si

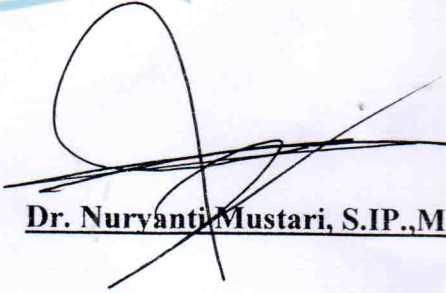
Mengetahui

Dekan Fisipol
Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Uncangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0013/FSP/A.3-VIII/I-10/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari selasa 26 februari 2019



Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

1. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si
2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
3. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RENALDI ANAS

NomorStambuk : 10564 01950 14

Program Studi : IlmuPemerintahan

MenyatakanbahwabenkaryaimiahiniadalahHasilkerjasayasendiritanpabantuand
aripihak lain atautelehditulis/dipublikasikan orang lain ataumelakukanplagiat.
Pernyataaninisayabuatdengansesungguhnyadanapabiladikemudianharipernyataa
ninitidakbenar, makasayabersediamenerimasanksiakademiksesuaiaturan yang
berlaku.

Makassar,7 Agustus2018

Yang Menyatakan,

RENALDI ANAS

ABSTRAK

Tata Kelola Bencana Banjir Di Kota Makassar (Pembimbing Anwar Parawangi, Adnan Ma'ruf)

Tata Kelola Bencana Banjir Di Kota Makassar, Skripsi. Gerakan, peran, serta tanggapan pemerintah dan BPBD dalam tata kelola bencana banjir Di Kota Makassar merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu system yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi sehingga dapat menyebabkan kerugian materi bahkan hilangnya wasekaligus. Oleh karena itu antisipasi sejak dini sangat penting untuk ditingkatkan bersama masyarakat. Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki hal penting dalam berpartisipasi untuk ikut memberdayakan hidupnya. Agar rasa aman dan antisipasi masyarakat yang daerahnya rawan berdampak resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambar dan menjelaskan tentang pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dinamisor di Kota Makassar.

Penelitian ini mengkaji tentang strategi dalam penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 10 orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang penulis teliti antara lain : Kepala BPBD Kota Makassar, Sekretaris BPBD Kota Makassar, Kepala Pencegahan dan Rekonstruksi, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Kepala Bidang Kedarifatan dan Logistik, Kepala Kecamatan Manggala, Ketua Posko, masyarakat, data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument yang berupa observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara. Hasil penelitian ini peran pemerintah dan BPBD Kota Makassar 1) Fasilitator, 2) Regulator, 3) Dinamisator dalam tata kelola bencana banjir di Kota Makassar yang merasakan proram-program pemerintah yang dilaksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana. Begitu juga partisipasi warga sekitar yang sangat membantu dan aktif dalam melibatkan diri dalam persiapan penanganan.

Kata Kunci: Tata kelola dan bencana banjir

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunianya semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga kripsi yang berjudul “Tata Kelola Bencana Banjir Di Kota Makassar” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyusun kripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan kripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat dirampungkan sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada a yang terhormat:

1. Drs. M Anas Lannodan Ibunda tercinta Andi Hj Astuti Mappangara yang telah membesarkan penulis dan atas doatulus, kasih sayang, pengorbanan, pengertian dalam mendidikserta membesarkan penulis. Serta kakak tercinta.
2. Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Sis selaku pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf Sos M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa

3. meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.SosM.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terimah kasih kepada teman-teman di UKM Tapak Sucidan IMM SOS-POL FISIP BEM SOSPOL, HIMJIP, dan sahabat-sahabat saya surya hardiansyah yang telah membantu memberikan saran dan support kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2014 terkhusus seluruh teman-teman IP B2014 dan seluruh pihak yang tidak sempat di sebutkan satu persatu namanya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertamakali di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hingga selesai studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin! Sekian dan terimakasih.

WassalamuAlaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Makassar, 18Februari 2019



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
PENERIMAAN TEAM.....	IV
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola.....	6
B. Konsep Bencana Banjir.....	7
1. Definisi Bencana	7
2. Pengertian Banjir.....	8
3. Penyebab Banjir	11
4. Dampak Banjir	14
5. Penanggulangan Banjir	15
6. Tahap Tata Kelola Bencana Alam	17
C. Karangka Pikir	19
D. Fokus Penelitian	21
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25

D. Informan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. pengabsahan Data.....	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
C. Tata Kelola Bencana Banjir Di Kota Makassar	34

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi di mana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung oleh jaringan pematusan suatu wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat merugikan masyarakat. Peningkatan intensitas curah hujan secara dinamis dan signifikan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh peningkatan gejala dari pemanasan global berupa kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas yang terjadi di permukaan.

Permasalahan banjir di kota Makassar, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pembangunan rumah di daerah dataran rendah sehingga air tidak dapat meresap ke permukaan tanah dengan baik, selain itu jembatan nipa-nipa belum diperlebar sehingga menyebabkan air tidak mengalir dan menyebabkan banjir di daerah dataran rendah, waduk yang tidak berfungsi dan sungai jek”ne madingin belum di perdalam.

Kota Makassar termasuk kota besar dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini yang membawa dampak kepada peningkatan kebutuhan lahan dan permintaan akan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan prasarana kota yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan seperti degradasi lingkungan dan bencana alam.

Salah satu wilayah di Kota Makassar yang sering dilanda banjir saat musim penghujan yaitu :Kecamatan Manggala, Tidak sedikit kerugian yang di taksir akibat bencana banjir ini, baik itu secara fisik, sosial dan ekonomi. Banjir yang terjadi di akibatkan karena Wilayah Kecamatan Manggala memiliki kawasan dataran rendah, luapan air sungai karena air melebihi kapasitas sungai, banyaknya pembangunan rumah sehingga kurangnya penyerapan air di permukaan tanah, topografi yang rendah, pengaruh rob, robohnya tanggul, semakin padatnya bangunan yang menyebabkan kurangnya daya resapan air dan adanya waduk belum berfungsi dan masih tahap perbaikan, air kiriman dari daerah tetangga.

Beberapa cara untuk Pengendalian banjir yang terjadi di wilayah kota Makassar telah banyak dilakukan orang, diantaranya menggali sungai jek”ne madingin dan memperdalam lagi dan difungsikannya waduk mengurangi pembangunan rumah yang menyebabkan dataran rendah, dan peninggian tanggul sungai pada daerah dataran rendah salah satu upaya dalam mengurangi daerah rentan banjir yang ada di wilayah kota Makassar. Melihat masalah tersebut maka perlu adanya peran pemerintah dalam penanggulangan banjir, sebagaimana yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, pengawasan, dan pengendali dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dan efektivitas peran pemerintah dapat dilihat dari segi kinerjanya. (Rismawati, 2015)

Penanggulangan Bencana di Kota Makassar ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu: (1) Peraturan Walikota Makassar No 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (2) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda No 3 Tahun 2009 Tentang SKPD Kota Makassar; (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Yaitu: (a) fungsi koordinasi, (b) fungsi komando, (c) fungsi pelaksana.

Secara sederhana tata kelola (*good corporate governance*) dapat didefinisikan sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber pemerintahan untuk berfungsi secara efisien, guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemangku kebijakan maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi: pra-bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana); dan pasca bencana (pasal 33). Untuk situasi di suatu daerah di mana terdapat potensi terjadinya bencana (tingkat kerentanan bencana tinggi) maka pada tahap pra bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan meliputi : kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana (pasal 44). Tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana dapat berbentuk kesiapsiagaan (*preparedness*), yaitu: tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan,

organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat

Pada tanggal 7 July 2018 peneliti melakukan observasi ke daerah yang akan menjadi lokasi penelitiannya. Peneliti bertemu dengan Kepala PLT Kecamatan Manggala dan melakukan perbincangan. Dalam pembicaraan tersebut, peneliti mendapat informasi bahwa salah satu daerah Kecamatan Manggala pernah terjadi banjir bandang yaitu kelurahan Manggala yang termasuk wilayah kawan banjir Tiap datangnya hujan, adapun bentuk pemerintah sebagai fasilitator dikecamatan Manggala, kelurahan Manggala dalam mengatasi banjir dengan bantuan dan kerja sama BPBD Kota Makassar dalam mengevakuasi dan memfasilitasi korban bencana setiap datangnya hujan deras di kecamatan Manggala. Kota Makassar merupakan Kota yang memiliki banyak kecamatan dan tidak sedikit setiap tahunnya sering terkena banjir salah satu kecamatan di Kota Makassar yang sering terkena banjir adalah Kecamatan Manggala Kota Makassar karena kurangnya Tata Kelola.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul *“Tata Kelola Bencana Banjir Di Kota Makassar”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pola tata kelola bencana banjir di kota Makassar?
2. Bagaimana Kerja sama pemerintah dan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir Di Kecamatan Manggala Kota Makassar

3. Bagaimana usaha organisasi BPBD dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat sebelum dan sesudah terjadi bencana di Kota Makassar kecamatan Manggala

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya dan ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.
2. Secara (praktis), sebagai bahan masukan bagi pemerintahan kota Makassar mengenai tata kelola bencana banjir di kota Makassar



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola

Pengertian Tata Kelola

Menurut turnbull report di Inggris (dalam Adhyaksa Dault, 2012:6). Tata kelola pemerintahan yang baikkemudian diikuti oleh tsuguoki fujinuma adalah:

Secara sederhana tata kelola pemerintah yang baik bisa difenisikan sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber pemerintahan untuk berfungsi secara efisien, guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemangku kebijakan maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Tata kelola pemerintah yang baik. Pertama, perangkat keras (*hardware*), yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Kedua perangkat lunak (*software*), yang bersifat psikosial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan etika berperilaku (*behavioral ethics*)

Jogiyanto dan Abdillah (dalam Fajrin Rizkia Pratiwi Suwarno, 2014:32) menjelaskan bahwa tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik pemerintahan yang baik

dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pada sektor publik (Sari 2013:2).

Menurut beberapa ahli yang dirangkum oleh Paim dan Flexa, (dalam Dicky Rutanaji, 2013:02). Dalam proses *governance* Pengertian Tata Kelola telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dan dirangkum oleh Paim dan Flexa dalam *Process Governance: Definition and Framework* adalah sebagai berikut: (a) Tata kelola sebagai instrument untuk menjamin bahwa proses, desain dan strategi bekerja dengan baik serta digunakan untuk memastikan adanya keselarasan antara ketiganya. (b) Tata kelola sebagai kebutuhan untuk memastikan koordinasi antara proses inisiatif oleh unit-unit fungsional yang berbeda dan untuk menghilangkan ketidakselarasan antara strategi organisasi dan proses. (c) Tata kelola digunakan untuk mendefinisikan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana sebuah organisasi harus melakukan fungsi yang baik.

B. Konsep Bencana Banjir

1. Definisi Bencana

Menurut Supriharjo (dalam Sidharta Adyatma dkk. 2017:1) Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda. Kondisi lingkungan yang ada sekarang sangat memprihatinkan banyak bencana yang terjadi. Kondisi lingkungan yang ada sudah tidak dapat lagi mengendalikan dan mencegah terjadinya bencana.

Menurut Sigit & Priyono (dalam Sidharta Adyatma dkk. 2017:2) Bencana alam semakin meningkat dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh proses alam maupun manusia itu sendiri yang menimbulkan korban jiwa, harta benda maupun material cukup besar. Bencana alam dapat dipicu oleh adanya penggundulan hutan, pembukaan lahan usaha di lereng-lereng pegunungan, dan pembuatan sawah-sawah basah pada daerah-daerah lereng lembah yang curam.

Bencana merupakan suatu peristiwa di alam yang disebabkan oleh manusia maupun alam yang berpotensi merugikan kehidupan manusia, mengganggu kehidupan normal, serta hilangnya harta dan benda. Pengertian lain dari bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Karana, R. C., & Suprihardjo, R, 2013).

Menurut Triwidiyanto, (dalam Nurlianti dkk 2017). Bahaya merupakan suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, bahaya menjelaskan kondisi secara geografis, lokasi, intensitas, kemungkinan terjadi bencana.

2. Pengertian Banjir

Menurut(Rachmat & Pamungkas, 2014) Banjir adalah salah satu bentuk fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi di mana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung oleh jaringan pematasan suatu

wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat merugikan masyarakat. Peningkatan intensitas curah hujan secara dinamis dan signifikan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh peningkatan gejala dari pemanasan global berupa kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas yang terjadi di permukaan

Menurut Schwab et al (dalam Somantri, 2010:11) Banjir adalah luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan atau salju yang mencair atau dapat pula karena gelombang pasang yang membanjiri kebanyakan pada dataran banjir.

Menurut Hewlet (dalam Somantri, 1982:3) banjir adalah aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi bahkan menyebabkan kehilangan jiwa. Dalam istilah teknis banjir adalah aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung sungai, dan dengan demikian, aliran air sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya.

Menurut Richards (dalam Adi Pratama, 2015) banjir memiliki dua arti yaitu (1) meluapnya air sungai disebabkan oleh debit sungai yang melebihi daya tampung sungai pada keadaan curah hujan yang tinggi dan (2) banjir merupakan genangan pada daerah rendah yang datar yang biasanya tidak tergenang. Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau tidaknya suatu daerah terkena banjir dengan didasarkan pada faktor-faktor alam yang mempengaruhi banjir antara lain faktor meteorologi (intensitas curah hujan, distribusi curah hujan, frekuensi dan lamanya hujan berlangsung) dan

karakteristik daerah aliran sungai (kemiringan lahan/kelerengan, ketinggian lahan, tekstur tanah dan penggunaan lahan)

Menurut Ramli(dalam Harliani, 2014:1) Banjir merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan sering dihubungkan dengan penggundulan hutan di kawasan hulu dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS).Pengertian bencana banjirmenurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Banjir umumnya terjadi di dataran rendah di bagian hilir daerah aliran sungai, dimana daerah dataran rendah umumnya menjadi pusat permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah disekitarnya (Rismawati. Dkk. 2015:8).

Banjir adalah kondisi meluapnya air dari dalam saluran akibat tidak tertampungnya air atau terhambatnya aliran air. Salah satu penyebab banjir adalah erosi dan sedimentasi yang terjadi di hulu sungai dan membawamaterial sampai hilir sungai. Hal ini menyebabkan kapasitas tampungan sungai menjadi berkurang sehingga menimbulkan banjir (Putri. 2015:24)

Menurut Nurjanah, R. Sugiharto, (dalam dwi muluyani, Dkk. 2014:9) banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai.

Robertj Kodoatie dan Sugianto (dalam Kadir2016:9) pengertian Banjir merupakan proses meluapnya air sungai ke daratan sehingga dapat menimbulkan kerugian harta benda penduduk serta dapat menimbulkan korban jiwa, banjir

dapat merusak bangunan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup serta merusak tata kehidupan masyarakat, maka sudah semestinya dari berbagai pihak perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan banjir dan sedini mungkin diantisipasi untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan

3. Penyebab Banjir

Menurut Rizky Novi (dalam Nasyiruddin,2013:5) Adapun faktor penyebab terjadinya banjir antara lain:(1) Banjir karena sungai meluap merupakan banjir yang terjadi akibat dari sungai tidak mampu lagi menampung aliran air yang ada di sungai itu akibat debit airnya sudah melebihi kapasitas; (2) Banjir lokal adalah banjir yang terjadi akibat air yang berlebihan disuatu tempat dan meluap juga di tempat itu sendiri; (3) Banjir akibat pasang surut air laut adalah banjir yang terjadi saat air laut pasang, ketinggian muka air laut akan meningkat, otomatis aliran air di bagian muara sungai akan lebih lambat dibandingkan bila saat laut surut; (4) Peristiwa Alam merupakan jenis banjir diakibatkan oleh peristiwa mendadak seperti jebolnya bendungan atau bencana lain seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi.

Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab banjir adalah perubahan iklim. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan banjir melalui peningkatan curah hujan, peningkatan aliran sungai gletser, dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub bumi atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan rob (Satterthwaite 2008). Banjir rob dan fenomena lain yang timbul sebagai efek samping dari naiknya permukaan air laut yang telah disebutkan di atas memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung

terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut umumnya merupakan kehilangan pendapatan atau peningkatan jumlah pengeluaran untuk beradaptasi, misalnya biaya rekonstruksi rumah, biaya pembelian air bersih, dan lain sebagainya (Fachruddin, 2012:1).

Kodoatie dan Syarief (dalam Arif Rosidy. 2013:4) menjelaskan faktor penyebab banjir a.l perubahan guna lahan, pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai, system pengendalian banjir yang tidak tepat, curah hujan tinggi, fisiografi sungai, kapasitas sungai yang tidak memadai, pengaruh air pasang, penurunan tanah, bangunan air, kerusakan bangunan pengendali banjir.

Menurut (Kadir, 2016:11) identifikasi penyebab utama terjadinya bencana banjir yakni sebagai berikut:

a. Faktor Kondisi Alam

Beberapa aspek yang termasuk dalam faktor kondisi alam penyebab banjir adalah kondisi alam (misalnya letak geografis wilayah), kondisi topografi, geometri sungai, (misalnya meandering, penyempitan ruas sungai, sedimentasi dan adanya ambang atau pembendungan alami pada ruas sungai), serta pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya degradasi lahan, sehingga menambah luasan areal dataran rendah.

b. Faktor Peristiwa Alam

- 1) Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan;
- 2) Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai;
- 3) Air/ arus balik (*back water*) dari sungai utama;

- 4) Penurunan muka tanah (land subsidence);
- 5) Pembendungan aliran sungai akibat longsor, sedimentasi dan aliran lahar dingin.

c. Aktivitas Manusia

- 1) Pembudidayaan daerah dataran banjir;
- 2) Peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai;
- 3) Belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir;
- 4) Permukiman di bantaran sungai;
- 5) Sistem drainase yang tidak memadai;
- 6) Terbatasnya tindakan mitigasi banjir;
- 7) Kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai;
- 8) Penggundulan hutan di daerah hulu;
- 9) Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir;
- 10) Elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

d. Adapun penyebab banjir akibat manusia menurut (Sebastian, 2008:4) yakni sebagai berikut:

- 1) Perubahan kondisi DAS. Perubahan kondisi DAS seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahantataguna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan tata guna lahan berkontribusi besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir.
- 2) Kawasan kumuh dan Sampah Perumahan kumuh (slum) di sepanjang bantaran sungai dapat menjadi penghambat aliran. Masalah

kawasan kumuh ini menjadi faktor penting terjadinya banjir di daerah perkotaan. Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang ditentukan masih kurang baik dan banyak melanggar dengan membuang sampah langsung ke alur sungai, hal ini biasa dijumpai di kota-kota besar. Sehingga dapat meninggikan muka air banjir disebabkan karena aliran air terhalang.

- 3) *Drainase lahan Drainase* perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantaran banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi.
- 4) Kerusakan bangunan pengendali air Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir.

4. Dampak Banjir

Menurut Mahardy (dalam Sidharta Adyatma, dkk. 2017) Dampak banjir antara lain:

- 1) Bangunan akan rusak atau hancur akibat daya terjang air banjir, terseret arus, terkikis genangan air, longsohnya tanah disepular atau dibawah pondasi.
- 2) Hilangnya harta benda dan korban nyawa.
- 3) Rusaknya tanaman pangan karena air.
- 4) Pencemaran tanah dan air karena arus air membawa lumpur, minyak dan bahan-bahan lainnya.

Secara umum dampak banjir dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung relative lebih mudah diprediksi dari pada dampak tidak langsung. Dampak banjir menimbulkan korban luka-luka maupun meninggal seperti yang terjadi di Wasior maupun Bohorok.

Kodoatie dan Syarief (dalam Rosyidie, 2013:5) memberikan beberapa contoh dampak atau kerugian banjir (a) hilangnya nyawa atau terluka, (b) hilangnya harta benda, (c) kerusakan permukiman, (d) kerusakan wilayah perdagangan, (e) kerusakan wilayah industri, (f) kerusakan areal pertanian, (g) kerusakan system drainase dan irigasi, (h) kerusakan jalan dan rel kereta api, (i) kerusakan jalan raya, (j) jembatan, dan bandara, (k) kerusakan system telekomunikasi, dll

5. Penanggulangan Banjir

Menurut Manu (dalam Rismawati, 2015:5) ada beberapa cara untuk penanggulangan bencana banjir:

- a. Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik;
- b. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air;
- c. Berhenti membangun perumahan ditepi sungai, karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai;
- d. Berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar, karena akan menyebabkan bumi ini akan semakin sulit menahan bebannya dan membuat permukaan tanah turun;

- e. Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Sebenarnya menebang pohon tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul.

Dalam menanggulangi bencana banjir, pemerintah daerah terkait untuk meminimalisir terjadinya banjir. Efektivitas suatu kebijakan pemerintah tidak akan berarti apabila mengenai bencana banjir dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut dari pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi banjir. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang mengurangi banjir seperti, membuat waduk yang dapat menampung air hujan dan menyediakan tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan serta masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjagalingkungan. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk menanggulangi banjir dan melakukan penghijauan atau penanaman pohon disekitar lahan kosong (Rismawati, 2015:6).

Penanggulangan banjir untuk menekan besarnya bencana dan mengatasi secara darurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan satkorlak penanggulangan bencana, yang dilaksanakan sebelum kejadian banjir (meliputi perondaan dan pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir/dataran banjir), pada saat kejadian banjir berupaya upaya penyelamatan, pengungsian, penutupan tanggul yang bocor dan atau limpas,

maupun kegiatan pasca banjir yang berupa penanganan darurat dan perbaikan terhadap kerusakan akibat banjir (Yulaelawati, 2008:22).

Yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko banjir di bawah ini berbagai jenis kegiatan fisik (struktur) berikut manfaatnya.

- a. Pembangunan waduk-waduk atau bendungan pengendali banjir, yang sekaligus untuk irigasi pertanian, pembangkit, listrik, peristiwa dan sebagainya.
- b. Pembangunan tanggul-tanggul di pinggir sungai pada titik-titik daerah rawan banjir. Tujuannya adalah mencegah meluapnya air pada tingkat ketinggian tertentu ke daerah rawan banjir.
- c. Pembangunan kanal-kanal yang bertujuan menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran sungai
- d. Pembangunan interkoneksi antar sungai, yang bertujuan merendahkan tingkat ketinggian muka air sungai.
- e. Pembangunan polder, bertujuan untuk mengumpulkan dan memindahkan air dari tempat yang mempunyai elevasi yang rendah ke tempat yang mempunyai elevasi lebih tinggi (Yulaelawati, 2008:18-20).

6. Tahap Tata Kelola Bencana

Tata Kelola Bencana adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan (*mitigasi*), penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi, baik sebelum pada saat maupun setelah bencana dan menghindarkan dari bencana yang terjadi.

Berdasarkan pengertian tersebut, tata kelola tidak hanya pada saat dan setelah terjadinya bencana tetapi upaya pencegahan juga termasuk kedalam kegiatan tata kelola bencana. Karena itu tata kelola bencana dilakukan melalui beberapa tahapan. (Donna,2011)

1. Sebelum Bencana (Pencegahan)

dalam regulator upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana alam. Contoh-contoh kegiatan pada regulator adalah:

- a. Pembuatan waduk untuk mencegah terjadinya banjir dan kekeringan
- b. Pembuatan tanggul untuk menghindari banjir.
- c. reboisasi untuk mencegah terjadinya kekeringan dan banjir, dan sebagainya

2. Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Tanggap Darurat, hal paling pokok yang sebaiknya dilakukan adalah penyelamatan korban bencana. Inilah sasaran utama dari tahapan Tanggap Darurat. Selain itu, Tanggap Darurat bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal

Para korban juga perlu dibawa ke tempat sementara yang dianggap aman dan ditampung di tempat penampungan sementara yang layak. Fasilitator juga melakukan pengaturan dan pembagian logistik atau bahan makanan yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana. Secara operasional, fasilitator diarahkan pada kegiatan:

- a. Penanganan korban bencana termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban yang luka-luka
- b. Penanganan pengungsi
- c. Pemberian bantuan darurat
- d. Pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih
- e. Penyiapan penampungan sementara
- f. Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum sementara serta memperbaiki sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk para korban.

3. Setelah Bencana (Rehabilitas)

Dalam Rehabilitas, upaya yang dilakukan adalah perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan pengembalian harkat korban. Rehabilitas bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindak lanjuti tanggap darurat, seperti rehabilitas bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan.

Sasaran utama dari tahap rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik sampai pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek kejiwaan/psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

C. Kerangka Pikir

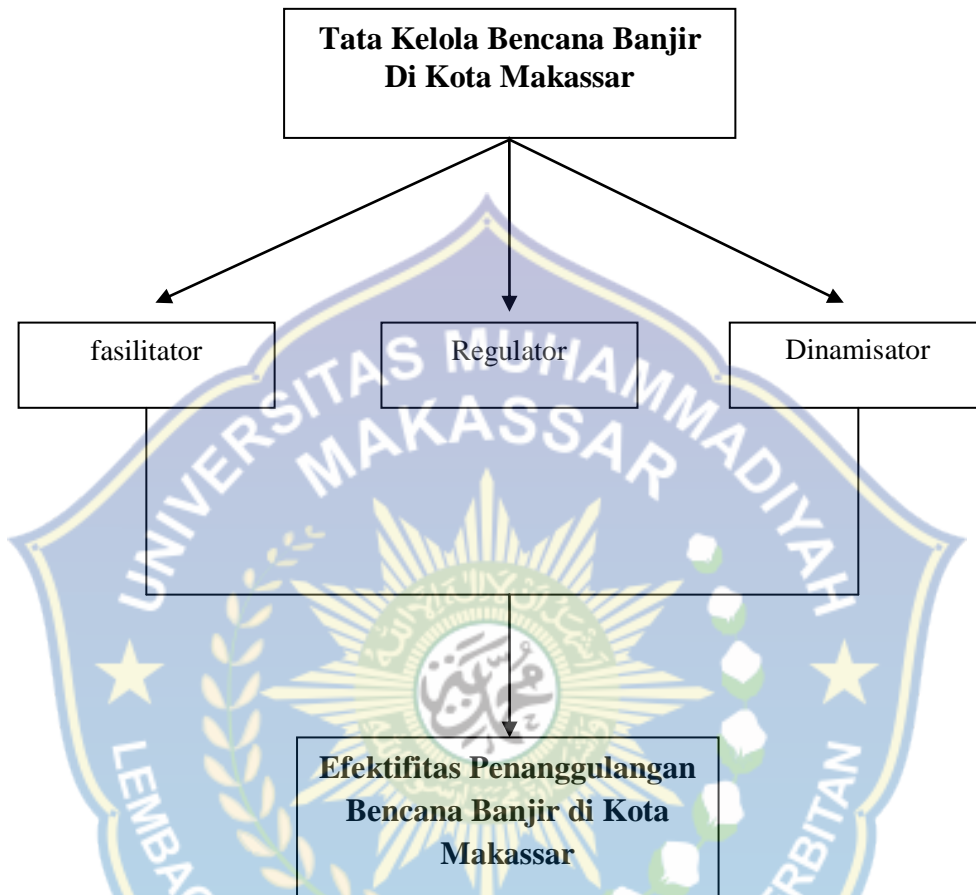
Kinerja pemerintah kota Makassar merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu kota, maupun instansi tertentu

oleh karena itu, satuan unit yang bekerja khusus dalam bidang pekerjaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam harus bekerja dengan disiplin, efisien dan efektif. Dengan demikian pemerintah kota makassar dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan dirasakan kinerjanya oleh masyarakat yang ada di daerahnya.

Terkhusus yang terjadi di kota Makassar, kota Makassar mengalami bencana banjir di beberapa wilayah seperti Kec. Manggala dan Kec. Tallo yang mengakibatkan kerusakan parah pada sarana dan prasarana kehidupan masyarakat mulai dari infrastruktur hingga drainase. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk tata kelola bencana banjir di kota Makassar, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Makassar dalam menanggapi bencana alam yang terjadi pada daerah tersebut.

Untuk memudahkan dalam pembacaan kerangka pikir, berikut bagan kerangka pemikiran penelitian ini:

Pada bagan 2.1 kerangka pikir ini menyajikan beberapa indikator Penanggulangan banjir yaitu sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas maka perlu di uraikan fokus penelitian untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini sebagai berikut. Peran indikator Tata kelola bencana banjir di kota Makassar

E. Deskripsi Fokus penelitian

Adapun Definisi Fokus Sebagai Berikut:

1. Peran pemerintah kota Makassar dalam penanggulangan bencana banjir yaitu pemerintah dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana yaitu mengarahkan Masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran dan perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

a. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau bantuan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat setempat.

b. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana.

c. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan kota. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara

intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Efektifitas penanggulangan bencana banjir dengan pemerintah tanggap dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasara umum adalah hal yang sangat diharapkan masyarakat di kota Makassar sehingga terhindar dari banjir dadakan tiap kali hujan datang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini diperkirakan memakan waktu lebih 2 bulan setelah seminar proposal ini. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Adapun tempat penelitian berlokasi di kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sul-Sel) dengan alasan untuk meneliti dan mengetahui pola tata kelola bencana banjir di kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Peneliti merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:1).

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono, 2014:3) suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan

secara objektif. sedangkan dasar penelitiannya adalah survei yakni tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari bentuk tata kelola bencana banjir di kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015:403) mendefinisikan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada Dinas BPBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sul-Sel) Data Sekunder.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:131) data sekunder yaitu sumber data penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan/jurnal dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen yang berisi informasi penting.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi /keterangan, situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive data* dan *Snowball data*. *Purposive data* adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini berdasarkan orang-orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, sedangkan *Snowball data* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan satu atau dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh informan sebelumnya, begitu seterusnya (Sugiyono, 2014:127).

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Makassar
- Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Makassar
- Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
- Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
- Kepala Bidang Rehabilitas Dan Rekonstruksi
- Pemerintah Kecamatan Manggala
- Pemerintah Kelurahan Manggala
- RW/Ketua Posko Penyaluran Bantuan Sekecamatan Manggala
- Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Observasi

Menurut Marshall (Sugiyono, 2013:64) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi terus terang atau tersamar untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang masih rahasia sehingga kemungkinan jika dilakukan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. Observasi penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan bentuk tata kelola bencana banjir di kota makassar

2. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2013:72) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan dukungan alat bantu buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera untuk bukti konkrit jika memang benar melakukan wawancara dengan pihak yang memahami permasalahan.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:82) dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada dilokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumentasi dapat berupa tulisan atau pun berita media *online*, arsip-arsip tertulis dari kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sul-Sel) atau pun dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet yang berkaitan untuk membantu penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat induktif yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:247) langkah-langkah dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data (*data collection*), adalah langkah untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan

data penelitian melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dokumentasi serta beberapa referensi buku maupun penelusuran online.

2. Reduksi Data (*data reduction*), adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar dari catatan tertulis lapangan penelitian, membuat ringkasan, penggolongan kategori jawaban dan kualifikasi jawaban informan penelitian kembali catatan yang telah diperoleh setelah mengumpulkan data. Penelitian mereduksikan data setelah melakukan pengumpulan data dan hal ini bertujuan untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. Peneliti memilih dan memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, mengenai Bagaimana bentuk tata kelola bencana banjir di kota makassar
3. Penyajian Data (*data display*), yakni penyusunan penyajian kategori jawaban informan dalam tabel, kecenderungan dari informan disertai analisis awal terhadap berbagai temuan data di lapangan sebagai proses awal dalam pengelolaan data. Peneliti melakukan penyusunan data yang direduksikan, selanjutnya dilakukan analisis hasil penelitian. Sehingga menghasilkan data yang dapat dijadikan pembahasan dan ditarik kesimpulan mengenai Bagaimana bentuk tata kelola bencana banjir di kota makassar
4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu dilakukannya pembahasan berdasarkan pada rujukan berbagai teori yang digunakan.

Peneliti melihat kesesuaian data di lapangan dengan teori yang digunakan, mengenai bentuk tata kelola bencana banjir di kota Makassar.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2013:269) menyatakan bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif bersifat majemuk, ganda dan dinamis selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Jadi, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu uji kredibilitas (validitas internal). Menurut Sugiyono (2013:270) uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Perpanjangan pengamatan, artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan sebelumnya merupakan data yang sudah benar atau tidak. Jika data yang diperoleh ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga memperoleh data yang pasti kebenarannya. Namun, jika setelah dicek data sudah benar yang berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri (Sugiyono, 2013:270-271).
2. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, data berbagai waktu. (Sugiyono, 2013:27-274).
 - a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian beberapa

sumber tersebut, data dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pandangannya sama atau tidak.

- b. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
 - c. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan waktu atau situasi yang berbeda.
3. Menggunakan bahan referensi dilakukan untuk membuktikan data yang telah ditemui oleh peneliti. Dalam laporan peneliti, sebaiknya data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2013:275). Peneliti melengkapi data dengan referensi berupa foto yang diambil selama penelitian.
 4. Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2013:276). Membercheck yang dilakukan peneliti adalah menanyakan kembali kepada narasumber data yang telah diperoleh untuk mengecek kredibilitas data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu oleh (Djafar Muhammad Irfan 2011) Berdasarkan tingkat pengetahuan warga mengenai banjir di desa romang tongaya kelurahan tamangapa kecamatan manggala Dalam penelitian ini, peserta seluruhnya berasal dari desa Romang Tangaya yakni RW/RT 006/004 dengan jumlah 246 jiwa yang terdiri dari 74 KK dimana sebagian besar kepala keluarga bekerja sebagai petani yang latar belakang pendidikannya pun sebagian besar tidak bersekolah. Hasil analisis data tentang tingkat pengetahuan menunjukkan bahwa pada pretest mayoritas kepala keluarga memiliki tingkat pengetahuan kurang yakni sebesar 56,89% dan baik hanya berkisar 43,2%. Sedangkan pada post-test didapatkan mayoritas kepala keluarga memiliki tingkat pengetahuan yang baik yakni sebesar 76,8% dan kategori kurang menjadi 21,6%. Dengan demikian, penyuluhan tentang kesiapsiagaan bencana banjir terhadap tingkat pengetahuan kepala keluarga dapat diterima.

Adapun hasil penelitian rachmat, Ade Reza, and Adjie Pamungkas terhadap Bencana Banjir di pengaruhi 6 faktor antara lain.

1. Faktor kondisi drainase yang tidak memadai.
2. Faktor dekatnya jarak bangunan dengan sungai sehingga mudah terkena luapan sungai
3. Faktor lokasi permukiman berada di daerah akumulasi genangan (Cekungan dan Landai)

4. Faktor Penurunan Daya Infiltrasi Tanah
5. Faktor Konstruksi Jalan Rentan Kerusakan Akibat Genangan
6. Faktor Tingginya Potensi Penduduk Terdampak Banjir

Adapun penelitian penulis mengenai tata kelola bencana banjir di Kota Makassar maka perlu diperdalam sungai Jek'ne Madingin, ditingkatkannya fungsi waduk, diperlebarnya jembatan Nipa-Nipa, ditingkatkannya jalanan yang rentan banjir.

B. Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Manggala merupakan daerah kawasan banjir setiap tahunnya hal ini menyebabkan banyaknya kepala keluarga yang terkena banjir dan menyebabkan luka-luka. Hal tersebut dirasakan oleh kelurahan Manggala yang merupakan daerah kawasan banjir dikarenakan tanah yang rendah dan adanya pembangunan rumah yang mengakibatkan air hujan mengalir ke daerah yang memiliki tanah yang dataran rendah, maka masyarakat mengharapkan adanya bantuan BPBD pasca bencana yang terkhusus dikecamatan Manggala kelurahan Manggala dengan memberikan bantuan kepada korban berupa bahan pangan, perahu karet, dan mengantarkan korban ke posko bencana yang telah dibuat oleh pemerintah setempat, dikarenakan banjir mencapai setinggi orang dewasa. Masyarakat juga mengharapkan adanya bantuan pemerintah dalam mengevakuasi masyarakat dan meningkatkan waduk yang telah dibuat namun belum dapat difungsikan. Kecamatan Manggala Merupakan daerah resapan air, pada bulan Desember- Februari, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya. Beberapa banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada

tahun 1967 dan 1976, sedangkan pada tahun 1983 dan 1986 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 1976. Banjir yang cukup besar yang terjadi di Kota Makassar beberapa tahun terakhir ini adalah yang terjadi pada tahun 1999, tahun 2000 dan 2012, dan akhir tahun 2017 dimana sebagian besar wilayah kota mengalami kebanjiranManggala dikarenakan tingginya air hujan, kerusakan akibat banjir bandang tersebut mengakibatkan banyaknya rumah hanyut, 4 orang tewas, 3 luka parah dan puluhan rumah dilaporkan rusak akibat terjangan banjir yang disertai lumpur bahkan infrastruktur warga seperti jalanan, peralatan rumah, dan masih banyak lagi prabot yang rusak akibat tingginya air. Menurut saksi mata banjir bandang tersebut berlangsung begitu cepat. Diawali dengan air yang cukup deras dari musim hujan yang datang.

C. Tata Kelola Bencana Banjir Di Kota Makassar

Pemerintah kota Makassar yang bekerja sama dengan Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang sebaiknya menyiapkan system peringatan dini (misalnya shine, detector, alat komunikasi, dan lain-lain) yang dapat diandalkan terutama didaerah yang rawan bencana banjir. Sehingga saat bencana terjadi masyarakat langsung tau apa yang harus dilakukan pemerintah, khususnya yang terkait bencana yang datangnya secara bertahap atau tanda tanda sebelum terjadinya banjir dan saling mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan

Peranan pemerintah kecamatan Manggala menjadi bagian yang harus di perhitungkan oleh pemerintah kota Makassar khususnya kecamatan Manggala teriptanya suasana kondusif selain itu berkat kehadiran BPBD media penanggulangan bencana alam dimanfaatkan sebagai wadah untuk membantu pemerintah dan masyarakat dengan berbagai aktifitas pencarian, penyelamatan dan pemberian bantuan kepada korban bencana.

Masyarakat membutuhkan segera informasi seputar korban bencana, bantuan yang ada dan tempatnya pengungsian sementara. Disamping itu pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana seperti pemberian bantuan dan relawan membutuhkan segera informasi seputar kebencanaan agar bisa segera mengambil kebijakan guna untuk menghindari korban bencana banjir, kerugian, akibat bencana. Upaya tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dibutuhkan pada masa tanggap darurat. Peran pemerintah kota Makassar dalam penanggulangan bencana banjir yaitu pemerintah dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran dan perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam dalam membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta

di bidang pendanaan atau bantuan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat setempat.

Untuk mengetahui gerakan fasilitator badan penanggulangan bencana (BPBD) BPBD sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah kota Makassar di lihat dari hasil wawancara di kantor BPBD kota Makassar (BPBD) sebagai berikut : pernyataan kepala pelaksana BPBD terkait masalah tata kelola bencana di kota makassar mengatakan bahwa

“saya sebagai Kepala BPBD tentunya selalu menggerakkan tim pasca bencana dan tentunya saya disini sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah selalu memfasilitasi setiap pasca bencana baik itu dapur umum dinas sosial, P3K dari dinas kesehatan dan lain-lain yang tentunya kami selalu siap siaga setiap pasca bencana” (Hasil Wawancara “MR”17 July 2018)

Kerja sama merupakan langkah awal dari penanggulangan baik dari BPBD maupun dari pemerintah setempat yang juga sebagai fasilitator dalam memberikan fasilitas seperti dapur umum dan alat-alat masak lainnya. Hal ini terkait dengan latar belakang UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yaitu (a) Fungsi kordinasi (b) fungsi komando (c) fungsi kordinasi.

Lebih lanjut wawancara dengan PernyataanBPBD terkait masalah perlunya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah tata kelola bencana di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami tentunya selalu berperan setiap datangnya banjir baik itu sebelum maupun sesudah, banyaknya korban-korban yang luka tahun 2017 di kecamatan Manggala tentunya kami siap memanggil dinas kesehatan yang fungsinya mengevakuasi warga yang terkena luka-luka dan mengevakuasi warga yang terjebak banjir turunlah bazarnas dan bantuan dari perahu karet” (Hasil Wawancara “MR” 17 July 2018)

Banyaknya luka-luka di Kecamatan Manggala merupakan tugas dari BPBD dalam meningkatkan kerja sama BPBD dan dinas sosial lainnya dan perlunya tingkat komunikasi dan setiap pasca bencana

Lebih lanjut wawancara dengan Pernyataankepala BPBD kota Makassar terkait masalah perlunya tanggap badan penanggulangan bencana daerah (kepala BPBD) sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah mengatakan bahwa:

“setiap pasca bencana dan mendapatkan informasi tentunya kami siap membantu yang menjadi tugas kami bersama dinas” yang lain dan kami berterimah kasih dengan pemerintah setempat warga yang sudah mau bekerja sama dengan BPBD dan pemerintah dalam kerja sama gotong royong pasca bencana” (Hasil Wawancara “MR” 17 July 2018)

Setiap pasca bencana perlunya ditingkatkan kesadaran BPBD Dan pemerintah setempat dalam penanggulangan pasca bencana dan perlunya komunikasi yang baik sehingga pemerintah dan BPBD bisa cepat dalam mengevakuasi warga

Lebih lanjut wawancara dengan (Pernyataan sekertaris BPBD kota Makassar) terkait masalah kinerja badan penanggulangan bencana daerah (sekertaris BPBD) sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah gerakan fasilitator tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“setiap pasca bencana saya selalu membantu team pasca bencana dengan memikirkan bantuan-bantuan yang kurang pasca bencana seperti perahu karet dan tentunya saya selalu memikirkan masalah keuangan anggaran dalam melaksanakan penanggulangan bencana kota Makassar” (Hasil Wawancara “K” 17 July 2018)

Perlunya ditingkatkan khas keuangan pasca bencana dalam meningkatkan fasilitas pasca bencana sehingga setiap bencana BPBD selalu cepat bergerak

dalam penanggulangan baik itu dari fasilitas maupun dari penanggulangan Hal ini terkait teori penanggulangan bencana banjir (dalam Rismawati, 2015:5)

Lebih lanjut wawancara dengan Pernyataansekertaris BPBD kota Makassar terkait masalah perlunya peran kinerja fasilitator badan penanggulangan bencana daerah (sekertaris BPBD) sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah tata kelola di kota Makassar mengatakan bahwa :

“peran saya tentunya selalu berkonfirmasi dengan dinas sosial, dinas kehahatan, dan bantuan dari kami PMI dan bazarnas dalam melihat korban yang terluka dan yang perlu di evakuasi dan kami pun selalu memberikan fasilitasi seperti barang-barang material yang bisa digunakan untuk sementara dengan bantuan rehab, seperti paku dan seng” yang hancur akibat banjir datang di kecamatan Manggala” (Hasil Wawancara “K” 17 July 2018)

perlunya tambahan seng-seng dan paku-paku dan bahan-bahan seperti beras dan bahan pokok yang lainnya, dan tambahan alat panci atau alat masak yang bisa digunakan untuk menggantikan alat peralatan yang sudah rusak, akibat banjir yang besar maka perlunya tambahan PMI dan bazarnas oleh pihak BPBD dan Pihak pemerintah hal ini terkait (dalam Sidarta Adyatma dkk 2017)

Lanjut wawancara dengan (Pernyataansekertaris BPBD kota Makassar) terkait masalah kinerja fasilitator badan penanggulangan bencana daerah (sekertaris BPBD) sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah perlunya tanggap tata kelola bencana banjir di kota Makassar

“Menurut saya pada saat itu sangat terbantu oleh BPBD beserta pihak pemerintah yang cukup tanggap dalam hal ini bantuan logistik pangan berdatangan sekitar 12 jam pasca bencana terjadi dan kami dibantu suka rela rekan baik obat-obatan maupun evakuasi ketempat posko penampungan yang kami siapkan untuk masyarakat yang terkena banjir besar” (Hasil Wawancara “K” 17 July 2018)

Dalam bencana banjir besar perlunya ditingkatkan lagi dalam penanggulangan dan perlunya komunikasi yang baik setiap pasca bencana dan tambahan obat-obatan pasca bencana besar.

Lebih lanjut wawancara dengan (Pernyataan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kota Makassar) terkait masalah kinerja fasilitator badan penanggulangan bencana daerah (kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan) sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah perlunya gerakan fasilitator tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami dari instansi BPBD sebagai fasilitator tentunya sudah menjalankan tugas kami setiap pasca bencana dengan membantu instansi pemerintah dengan menurunkan dinas sosial, dinas kesehatan, dalam membantu masyarakat kecamatan Manggala pasca bencana banjir (Hasil Wawancara “ML” 16 July 2018)

Menurunkan dinas-dinas sosial dan team-team pasca bencana merupakan penanggulangan kedua setiap bencana dan komunikasi yang baik kepada pemerintah setempat merupakan langkah antisipasi untuk menghindari bencana besar sehingga warga bisa di evakuasi terlebih dahulu.

Lanjut wawancara dengan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kota Makassar terkait masalah perlunya peran fasilitator badan penanggulangan bencana daerah (kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan) sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah kota Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Setiap Bencana Banjir kami selalu menginformasikan ke pemerintah dan ditindak lanjuti ke PU dan bekerja sama dengan dinas sosial, dan kami pun selalu memanggil PMI dan Bazarnas, dan bekerja keras dengan bantuan baik dari instansi pemerintah, dinas sosial, dinas kesehatan, dan dari anggota kami bazarnas untuk turun tangan langsung dalam mengevakuasi masyarakat yang terkena banjir” (Hasil Wawancara “ML” 16 July 2018)

Dalam komunikasi yang baik maka perlunya tindakan lebih lanjut kepada instansi pemerintah dalam bencana banjir dan menambahkan anggota-anggota PMI dan Bazarnas dalam kerja sama kepada pemerintah dalam mengevakuasi warga,

Lanjut wawancara dengan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kota Makassar terkait masalah tanggapan fasilitator badan penanggulangan bencana daerah (kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan) sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah kota Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“masukannya kita bisa bekerja lebih keras dengan saling membantu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah memberikan bantuan dengan meningkatkan fungsi waduk, dan BPBD meningkatkan kualitas pelayanan dengan menginformasikan ke dinas kesehatan, dinas sosial, dan pemerintah menginformasikan ke PU, dinas sosial dan PMI setiap adanya Banjir datang” (Hasil Wawancara “ML” 16 July 2018)

perlunya kerja sama pemerintah dan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir dan perlunya peningkatan kualitas pelayanan BPBD dengan meningkatkan komunikasi ke dinas ke dinas kesehatan, dinas sosial, dan pemerintah setiap datangnya banjir baik itu sebelum maupun sesudah

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan kepala PLT kecamatan Manggala) terkait masalah kinerja BPBD yang bekerja sama dengan pemerintah yang juga sebagai fasilitator gerakan tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya sebagai PLT kecamatan Manggala tentunya sudah konfirmasi kembali atas laporan BPBD akan terjadi hujan dalam tujuan membantu warga dalam kesiapsiagaan bencana banjir seperti, memanggil BPBD ke lokasi yang terkena banjir dalam membantu masyarakat mengangkut barang sebelum pasca bencana sehingga sebelum banjir datang warga-warga sudah

bisa di evakuasi terlebih dulu sebelum datangnya banjir secara materil”
(Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Setiap pasca bencana tugas BPBD datang lebih awal setiap terjadinya banjir dalam menyelamatkan warga-warga yang terkena banjir dan mengevakuasi warga terlebih dahulu dan perlu ditingkatkan komunikasi yang baik dalam penanggulangan bencana.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan Kepala PLT kecamatan manggala) terkait masalah kinerja BPBD yang bekerja sama dengan pemerintah yang juga sebagai fasilitator peran tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya rasa peran BPBD sudah lumayan memenuhi dalam memenuhi tugasnya dalam mengevakuasi warga terkhususnya di kecamatan Manggala kami dari instansi pemerintah sudah merasakan dengan bantuan BPBD Kota Makassar seperti menangkut barang-barang sebelum terjadi banjir dan kami dai instansi pemerintah bekerja sama dengan BPBD jika ada kekurangan setiap pasca bencana (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan kepala kecamatan manggala) terkait masalah kinerja BPBD yang bekerja sama dengan pemerintah yang juga sebagai fasilitator tanggapan tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“terkait masalah kinerja BPBD selama banjir di kecamatan Manggala Saya sangat merasa terbantu oleh kinerja BPBD dalam membantu instansi pemerintah kecamatan Manggala dan kami cukup puas dalam kerja sama dengan BPBD pasca bencana kami dari instansi pemerintah selalu siap menunggu kabar dari BPBD jika ada banjir besar sehingga kami bisa mengevakuasi warga terlebih dahulu (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Setiap pasca bencana, dalam hal ini perlunya ditingkatkan pelayanan BPBD baik dari komunikasi yang baik maupun dari kerja sama pemerintah dalam penanggulangan.

Untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan Manggala yang fungsinya sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan BPBD kota Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut: pernyataan PLT Kecamatan Manggala selaku kepala PLT kecamatan Manggala masalah perlunya gerakan fasilitator tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya sebagai PLT kecamatan Manggala tentunya sudah melakukan pergerakan setiap datangnya banjir tiap RW selalu melaporkan pada saat sebelum pasca bencana BPBD juga selalu memberikan informasi pada saat terjadinya banjir menurunkan team bazarnas PMI dan lainnya, sehingga saya bisa lebih cepat dalam mengevakuasi warga lebi dulu paling tidak berupa pengangkutan barang-barang yang dibantu oleh BPBD sebelum pasca bencana” (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Setiap pasca bencana perlunya gerakan Pemerintah Kec. Manggala agar lebih cepat memberikan informasi kepada warga lebih awal sehingga warga bisa di amankan terlebih dahulu dan dari pihak BPBD harus selalu siap menambahkan team agar warga bisa cepat di evakuasi dan mengamankan barang-barang material yang lainnya akibat hujan yang tinggi.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataankepala PLT kecamatan manggala) terkait masalah kinerja pemerintah yang juga sebagai fasilitator peran tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatkan bahwa:

“sebelum pasca bencana saya sebagai fasilitator di kecamatan Manggala tentunya sudah bekerja sama dengan BPBD dan masyarakat setiap datangnya banjir, kami dari instansi pemerintah sudah melakukan kesiapsiagaan dengan memanggil BPBD agar kiranya selalu stand by, dan kamipun dari instansi pemerintah sudah memberikan bantuan kepada Masyarakat berupa peralatan masak tambahan perahu dan memikirkan waduk yang harus ditingkatkan lagi (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

peningkatan waduk dan lebih di perdalamnya sungai jekne madingin dan difungsikannya waduk yang ada sehingga bisa mengurangi banjir dan BPBD

setiap paca bencana agar kiranya jauh sebelum terjadi, untuk menyiapkan alat-alat pasca bencana dan menginformasikan lebih awal ke pemerintah hal ini terkait dengan teori rismanawati 2015:5 dalam penanggulangan bencana banjir

Lanjut wawancara dengan (Pernyataankepala PLT kecamatan manggala) terkait masalah kinerja pemerintah yang juga sebagai fasilitator tanggapan tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“masukannya saya sebagai fasilitator perlunya ditingkatkan kerja sama dalam membersihkan lingkungan dan kami pun selalu siap siaga dengan memanggil BPBD pada saat musim bencana mendekati” (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

perlunya kerja sama dengan BPBD dalam membantu instansi pemerintah dalam mencatat warga-warga berapa yang terkena banjir dan membantu pemerintah dalam menambahkan apa saja kekurangan pada saat bencana banjir

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan kelurahan Manggala) atau yang mewakili sekretaris Lurah terkait masalah kinerja BPBD yang juga sebagai fasilitator gerakan tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“setiap pasca bencana kami merasa puas dengan cepatnya informasi BPBD khususnya di kecamatan Manggala kelurahan Manggalasehingga kami selalu bergerak lebih dulu dalam kerja sama dengan masyarakat dan BPBD dalam mengevakuasi warga terlebih dahulu, dari instansi pemerintah selalu siap menambahkan perahu karet dan bantuan dari BPBD dalam mengevakuasi warga untuk di antar ke posko penyaluran bantuan” (Hasil Wawancara “RS” 12 July 2018)

tidak cukup dengan adanya kerja sama saja tetapi perlunya meningkatkan keuangan baik itu pemerintah maupun dari BPBD sehingga setiap pasca bencana banjir pemerintah selalu melengkapi kebutuhan warga seperti perahu karet dan ditambahkan bantuan dari BPBD dan membantu pemerintah dalam mengevakuasi warga jauh sebelum terjadi bencana banjir.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan kelurahan Manggala) atau yang mewakili sekretaris Kelurahan terkait masalah kinerja BPBD yang juga sebagai fasilitator peran tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“Setiap banjir kami dari instansi pemerintah setiap mendapatkan laporan dari BPBD terkait dekatnya banjir pihak kelurahan melaporkan ke RW dan RT dimana saja yang rentang banjir, RW, RT melaporkan kembali ke kami, dari pihak kelurahan melanjutkan ke tingkat atas, untuk memberikan bantuan berupa perahu, tenda, dan dapur umum” (Hasil Wawancara “RS”, 12 July 2018)

Setiap pasca bencana diharapkan RW, RT selalu siap dalam menunggu informasi dari kami dan cepat bertindak setiap adanya banjir datang baik itu membantu pemerintah dan BPBD dalam mengevakuasi warga maupun mencatat kekurangan bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh warga

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan kelurahan Manggala) terkait masalah kinerja BPBD yang juga sebagai fasilitator tanggap tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami sebagai perantara masyarakat sangat berterima kasih dengan BPBD dengan bantuan yang diberikan berupa perahu, dan alat masak yang lainnya, kami dari instansi pemerintah merasa bantuan BPBD baik itu sebelum maupun sesudah dalam evakuasi dalam mengevakuasi barang-barang masyarakat pasca bencana sehingga tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar di kecamatan kami terkhusus di kelurahan Manggala maka dari tanggapan saya atau yang mewakili masyarakat BPBD sudah menjalankan tugasnya dengan baik” (Hasil Wawancara “RS”, 12 July 2018)

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait masalah gerakan, peran dan tanggapan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) BPBD di kecamatan Manggala kota Makassar dalam membantu pemerintah kota Makassar dan masyarakat sebagai aktifitas pencarian, penyelamatan dan pemberian bantuan kepada korban dilapangan terkait masalah kinerja BPBD kota

Makassar dapat disimpulkan bahwa badan penanggulangan bencana daerah belum dapat semua dirasakan datangnya bantuan maka dari itu pemerintah Manggala yang terkhusus di kelurahan Manggala mengatakan berterimah kasih dengan bantuan BPBD baik itu pengangkutan barang dan melaporkan ke instansi pemerintah sebelum pasca bencana sehingga warga bisa dievakuasi lebih cepat namun pada saat itu bantuan BPBD sudah ada dirasakan pasca pasca bencana pada saat itu walaupun warga terkena banjir sampai dada, namun yang membantu saya dalam mengevakuasi masyarakat team bazarnas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan PMI pada tahun 2017. Masyarakat tidak menduga bahkan akan banjir seperti ini, BPBD memang memberikan peringatan kepada kami khususnya masyarakat, agar kerugian dapat dikurangi/dicegah dengan cepat serta pihak pemerintah yang cukup tanggap dalam hal ini bantuan logistik, bantuan dari BPBD dan dinas sosial berdatangan sekitar 5 jam pasca bencana terjadi dan dibantu oleh sukarelawan baik obat-obatan maupun evakuasi ketempat poskopenampungan yang mereka siapkan untuk masyarakat yang terkena banjir besar.

2. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksana penanggulangan bencana.

Untuk mengetahui peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sebagai regulator dalam membantu pemerintah kota Makassar dan masyarakat sebagai aktifitas pencarian, penyelamatan dan pemberian bantuan kepada korban bencana di kota Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut berikut:

Pernyataan kepala pelaksana BPBD terkait masalah perlunya gerakan badan penanggulangan bencana banjir sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“gerakan kami pasca bencana dalam penanggulangan bencana tentunya kami dari BPBD sudah bekerja sama dengan pemerintah terkait masalah penanggulangan bencana, seperti memeberikan lebih awal info agar masyarakat bisa di evakuasi terlebih dahulu dan pemerintah setempat sudah bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan masukan seperti meningkatkan fungsi waduk dan lain-lain”(Hasil Wawancara “MR” 17 July 2018)

Perlunya ditingkatkan komunikasi dalam penanggulangan bencana dan meningkatkan fungsi waduk yang belum berfungsi dan meningkatkan penanggulangan bencana agar waduk bisa lebih cepat difungsikan sebelum bencana. Dalam hal ini terkait dengan (Rismawati, 2015:6). Untuk membangun fungsi waduk.

Lanjut wawancara dengan kepala BPBD terkait masalah perlunya peran tata kelola bencana banjir yang juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“setiap pasca bencana saya sebagai Kepala BPBD Kota Makassar pasca bencana di Kelurahan Manggala yang juga sebagai Regulator di kelurahan Manggala tentunya sudah memberikan acuan dasar Kepada Masyarakat setempat berupa pelatihan kepada masyarakat dan tata cara dalam mengelola lingkungan agar kiranya terbebas dari banjir dan saya sebagai BPBD setiap pasca bencana saya selalu menurunkan team-team dalam mengevakuasi warga setempat (Hasil Wawancara MR 17 July 2018)

BPBD sebagai regulator memberikan pelatihan kepada warga dan pemerintah agar dapat mengurangi bencana banjir seperti pengerukan sungai jekne madingin,ditingkatkannya waduk sebelum bencana,dari BPBD setelah banjir maka perlunya tindakan cepat dalam mengevakuasi warga dan menambahkannya peralatan masak, menambahkan bantuan PMI dan membantu pemerintah dalam mencatat warga-warga dan bahan-bahan yang lainnya.Hal ini terkait dengan teori yulealawati, 2008:18-20 untuk mengurangi resiko banjir.

Pernyataan kepala pelaksana BPBD terkait masalah tanggapan badan penanggulangan bencana banjir sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“tanggapan saya tentunya agar kiranya pemerintah dan masyarakat bisa lebih keras lagi dalam kerja sama setiap datangnya banjir dan sayapun merasa puas kepada team-team,pemerintah masyarakat yang sudah berkerja keras dalam mengevakuasi dan kami dari BPBD berterimah kasih kepada pemerintah yang sudah mengevakuasi warga sebelum terjadinya banjir besar”(Hasil Wawancara “MR”18 July 2018)

Kesuksesan dalam penanggulangan bencana gotong royong setiap pasca bencana seperti menyelamatkan barang-barang yang ada setiap pasca bencana.

Lanjut wawancara dengan Pernyataansekertaris BPBD kota Makassar terkait masalah kinerja fasilitator badan penanggulangan bencana daerah (sekertaris BPBD) sebagai regulator yang bekerja sama dengan pemerintah gerakan tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“Gerakan saya pasca bencana tentunya selaku regulator dan biasanya menggantikan ketua BPBD pasca bencana tentunya saya turun tangan langsung dalam melihat dan mengambil data dari korban bencana, sekertaris BPBD mempunyai 3Sub dan dimana salah satu dalam pasca bencana program data dan evaluasi, setiap pengambilan data korban bencana tentunya saya akan mengumpulkan data korban dan mengevaluasi siapa saja yang terkena bencana sehingga kami akan turun memberikan bantuan (Hasil Wawancarara “KH”17 July 2018)

Kepala BPBD bisa langsung turun tangan agar Kepala BPBD bisa dekat dengan warga dan mengetahui apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dibutuhkan pada saat bencana.

Lanjut wawancara dengan Pernyataansekertaris BPBD kota Makassar terkait masalah perlunya peran kinerja regulator badan penanggulangan bencana daerah (sekertaris BPBD) sebagai regulator yang bekerja sama dengan pemerintah mengatakan bahwa:

“peran saya tentunya selalu siapsiaga dimana ketua tidak bisa bertugas saya selalu menggantikan setiap bencana dan tiap banjir tentunya saya selalu turun tangan dalam mengevakuasi korban dan melihat berapa korban sehingga dari kami bisa melaporkan ke bagian bagan keuangan untuk siapsiaga dalam membeli peralatan seperti yang dibutuhkan saat banjir” (Hasil Wawancara “KH” 17 July 2018)

Diharapkan agar peran BPBD bisa dimaksimalkan lagi dalam mengevakuasi korban dan perlunya Kepala BPBD yang turun langsung dan melihat korban bencana agar Kepala BPBD bisa cepat mengatur warga dan kerja sama pemerintah dalam membuat posko dan menghitung rumah warga sehingga setiap

banjir kebutuhan warga bisa cepat digantikan akibat banyaknya barang-barang yang rusak.

Lanjut wawancara dengan kepala (Pernyataansekertaris BPBD) terkait masalah tanggap tata kelola bencana juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“tanggapan saya kepada pemerintah setempat agar kiranya bisa kerja sama setiap pasca bencana malakukan panggilan ke PU dan memberitaukan kepada kami apa saja kekurangan team BPBD biasanya kekurangan perahu maka harapan saya pemerintah bisa turun tangan dalam kerja sama mengevakuasi korban bencana banjir” (Hasil Wawancara “KH”17 July 2018)

Kerja sama merupakan langkah dalam mengevakuasi warga, salah satunya iyalah BPBD turun tangan langsung setiap mendekati musim hujan dan komunikasi yang baik pemerintah dan BPBD sehingga setiap pasca bencana warga bisa di selamatkan terlebih dahulu.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataankepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kota Makassar) terkait masalah gerakan kinerja BPBD badan penanggulangan bencana daerah (kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan) sebagai regulator yang bekerja sama dengan pemerintah mengatakan bahwa:

“kami dari BPBD selalu mendapatkan laporan dari instansi pemerintah setiap mendekati musim hujan dan kamipun selalu melakukan gerakan dengan sosialisasi dan memberitaukan kepada pemerintah kecamatan Manggala bahwa dekat-dekat ini akan terjadi hujan besar”(Hasil Wawancara “ML” 16 July 2018)

perlunya pemberitahuan kepada dinas-dinas penanggulangan dan ditingkatkannya komunikasi baik itu kepada pemerintah,dinas sosial sehingga dalam mengevakuasi warga bisa cepat diatasi dan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Hal ini terkait dengan teori pengertian banjir dalam kadir 2016:9

Lanjut wawancara dengan (Pernyataankepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan) terkait masalah perlunya peran kinerja tata kelola bencana yang juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“peran saya setiap banjir perlunya konfirmasi ke dinas PU terkait masalah banjir,dan konfirmasi ke dinas kesehatan berapa PMI yang bisa diturunkan, dinas sosial dalam membantu masyarakat dengan memberikan bantuan makanan dan alat dapur, dan kami dari instansi BPBD kota Makassar menurunkan bazarnas dalam mengevakuasi masyarakat yang terkena banjir untuk dibawa keposko masing-masing” (Hasil Wawancara “ML” 16 July 2018)

konfirmasi ke dinas PU, Dinas Sosial setiap datangnya banjir maka dalam kerja ke dinas-dinas lainnya perlunya tingkatan komunikasi yang baik agar setiap banjir bisa cepat di atasi

Lanjut wawancara dengan (Pernyataankepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan) terkait masalah tanggap tata kelola bencana yang juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“masukan saya kepada pemerintah tentunya kita bisa bekerja sama dengan adanya bantuan dari kami dan saya kiranya bisa cepat bergerak ketika mendapatkan informasi oleh BPBD terkait masalah datangnya hujan lebat” (Hasil Wawancara “ML” 13 July 2018)

BPBD merupakan alat bantu bagi pemerintah setiap pasca bencana maka dari itu perlunya komunikasi yang baik dan gerakan yang cepat dalam mengevakuasi warga.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataankepala bidang kedaruratan dan logistik) terkait masalah gerakan tata kelola bencana yang juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“banjir ditahun 2017 tentunya gerakan kami selalu turun ke lapangan dan mencatat berapa korban pasca bencana, berapa kepala keluarga yang terkena banjir, setelah itu data jadilah sebuah data dan kami bawa kekantor

kemudian kami menilai barang apa yang dapat kita berikan, pasca bencana” (Hasil Wawancara “M” 17 July 2018)

Perlunya data dalam setiap bencana banjir dan kerja sama pemerintah dalam memberikan data-data warga sehingga setiap bencana warga mendapatkan semua bantuan baik dari BPBD dan pemerintah.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan kepala bidang kedaruratan dan logistik) terkait masalah peran tata kelola bencana yang juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

Peran saya tentunya setiap pasca bencana banjir seperti paling pokok kita berikan misalkan bahan pangan makanan dari dinas sosial dan bazarnas dari BPBD kami juga dari BPBD memiliki mobil dapur, jika dari dinas sosial menyediakan kami tidak menyediakan, karena kami akan mengkafer yang lain seperti misalkan selimut, fieskip, babykip setelah kita mendata kemudian kami turun untuk memberikan bantuan pasca bencana” (Hasil Wawancara “ML” 17 July 2018)

Bantuan dari BPBD dalam menyelamatkan warga dan kerja sama pemerintah dalam memberikan data-data sebelum bencana sehingga pelayanan BPBD bisa ditingkatkan kepada masyarakat dan membantu pemerintah setiap bencana.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan kepala bidang kedaruratan dan logistik) terkait masalah tanggapan tata kelola bencana yang juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kita sangat mengharapkan sekali turun tangan pemerintah pada saat pasca bencana karena kita dari BPBD anggaran juga terbatas salah satu cara pimpinan tinggi kita itu bersedia kamipun dari BPBD selalu bermohon ke pak Walikota namun respon dilihat sebelah mata karena menurut kita penting belum tentu bagi dia penting, banyak hal yang kami bisa lakukan dengan melaporkan ke pemerintah kecamatan Manggala Makassar bahwa kecamatan Manggala perlunya pelebaran dan dibangun suatu tanah yang agak tinggi” (Hasil Wawancara “ML” 18 July 2018)

BPBD dalam menyelamatkan warga sudah terpenuhi dan komunikasi kepada pemerintah Kota Makassar belum dapat berjalan dikarenakan pemerintah acuh kepada bencana banjir, dan perlunya ditingkatkan komunikasi pemerintah setiap bencana hal ini terkait Sidharta Adyatma, dkk. 2017 perlunya perbaikan tanah dan memperdalam sungai sehingga bisa mengurangi bencana banjir.

Lanjut wawancara dengan kepala (Pernyataan kepala bidang rehabilitas dan rekontruksi) terkait masalah perlunya peran kinerja tata kelola bencana juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“peran kami sebagai rehabilitas, tentunya setelah bencana kami akan turun apa saja yang dibutuhkan pasca bencana seperti menggunakan bantuan balok, seng paku dll untuk dapat digunakan sementara dulu” (Hasil Wawancara “AM” 16 July 2018)

BPBD sebagai alat bantu bagi pemerintah dalam menutupi kekurangan yang ada pada saat bencana banjir dan mengevakuasi warga bisa ditingkatkan lagi

Lanjut wawancara dengan kepala (Pernyataan kepala bidang rehabilitas dan rekontruksi) terkait masalah tanggap tata kelola bencana yang juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“masukin saya selaku ketua Rehabilitas dan rekonstruksi kami cukup puas dengan kerja sama pemerintah dalam membantu masyarakat pasca bencana” (Hasil Wawancara “AM” 16 July 2018)

Perlunya Komunikasi yang baik dan kerja sama ke BPBD dalam membantu masyarakat baik itu secara meteril maupun bahan pangan lainnya

Lanjut wawancara dengan kepala (Pernyataan kepala kecamatan Manggala) terkait masalah perlunya gerakan kinerja tata kelola bencana juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya rasa gerakan BPBD cukup saya rasakan dikarenakan adanya bantuan BPBD dalam mencegah segala dampak bencana yang akan merugikan masyarakat BPBD selalu membantu instansi pemerintah dalam memberikan informasi tentang adanya banjir maka kami dari kecamatan Manggala selalu membentuk posko sebelum bencana (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Setiap pasca bencana banjir perlunya adanya perubahan dari tahun ke tahun terkait informasi bencana banjir sehingga bisa ditingkatkan dari tahun sebelumnya

Lanjut wawancara dengan kepala (Pernyataan kepala kecamatan Manggala) terkait masalah perlunya peran kinerja tata kelola bencana juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“point penting yang menjadi peran BPBD dalam membantu instansi pemerintah kecamatan Manggala ialah membantu masyarakat dalam mengevakuasi memberikan dapur umum dan memberikan barang-barang lainnya, pemerintah selalu berusaha meningkatkan waduk namum pada akhirnya waduk tidak berfungsi maka kami akan berusaha lagi sehingga kerja sama dengan BPBD bisa berjalan dengan baik”(Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Keseimbangan kinerja BPBD dan pemerintah harus ditingkatkan lagi baik itu BPBD dalam memberikan bantuan dan pemerintah dalam meningkatkan fungsi waduk.Hal ini terkait teori Sidharta Adyatma, dkk. 2017 perunya peningkatan tanah dan fungsi waduk.

Lanjut wawancara dengan kepala (Pernyataan kepala kecamatan Manggala) terkait masalah perlunya tanggapan kinerja tata kelola bencana juga sebagai regulator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya kira cukup jelas dalam kerja sama dengan BPBD dalam membantu instansi pemerintah dengan memberikan bantuan kapal pasca banjir dan memberikan pelatihan kepada warga membawa posko ke warga dan kerja sama kepada BPBD cukup baik kamipun dari instansi pemerintah sudah berusaha dengan meningkatkan waduk namum hasilnya belum bisa kita nikmati dan BPBD selalu memberikan masukan dan menurunkan team-team baik itu dari dinas sosial dan bantuan logistik pasca banjir dalam mengevakuasi warga-warga”(Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait masalah peranan pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kota Makassar dalam membantu pemerintah dan masyarakat sebagai aktifitas pencarian, penyelamatan dan pemberian bantuan korban bencana dapat disimpulkan badan penanggulangan bencana telah terealisasi dengan cukup baik karena BPBD cukup dirasakan walaupun saya untuk evakuasi hanyalah masyarakat sekitar, masyarakat tidak duga bahwa akan banjir seperti ini, BPBD beserta pihak pemerintah yang cukup tanggap dalam hal ini bantuan logistik pangan berdatangan sekitar 5 jam pasca bencana terjadi dan dibantu oleh sukarelawan baik obat-obatan maupun evakuasi ketempat posko penampungan bahan pangan dari dinas sosial, yang mereka siapkan untuk masyarakat yang terkena banjir besar, dan instansi pemerintah yang selalu siapsiaga sebelum pasca bencana dengan melaporkan ke BPBD, dan PU untuk melakukan penanganan kepada korban

3. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam peran pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh/maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Untuk mengetahui peran badan penanggulangan bencana banjir (BPBD) sebagai dinamisator dalam membantu pemerintah kecamatan dan masyarakat

sebagai aktifitas pencarian, penyelamatan dan pemberian bantuan kepada korban bencana di kota Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pernyataan kepala pelaksana BPBD terkait masalah peran badan nasional penanggulangan bencana sebagai dinamisor di kecamatan Manggala kota Makassar mengatakan bahwa:

“setiap banjir saya sebagai dinamisor menggerakan masyarakat setiap datangnya banjir kalaupun selalu bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah memberikan bantuan berupa dapur umum melatih masyarakat agar kiranya bisa mengurangi banjir dengan membersihkan selokan dan membantu masyarakat akibat rusaknya rumah dengan bantuan rehab, seperti paku seng dan lain-lain setelah bencana” (Hasil Wawancara “MR” 17 July 2018)

Perlunya peran dan kerja sama dengan pemerintah dan perlunya ditingkatkan lagi dalam melatih warga-warga setiap pasca bencana dan meningkatkan waduk sehingga warga bisa terbebas dari banjir

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan kepala BPBD di kota Makassar) yang juga sebagai dinamisor terkait masalah tanggapan tata kelola bencana banjir yang juga sebagai dinamisor di kota Makassar mengatakan bahwa:

“tanggapan saya pemerintah bisa lebih mengawasi masyarakatnya agar kiranya dapat bekerja sama dalam mencari solusi sehingga terhindarnya dari banjir” (Hasil Wawancara “MR” 17 July 2018)

Perlunya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat tentang tata kelola bencana banjir dan perlunya kerja sama BPBD dalam mencari solusi bencana banjir.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan Sekertaris BPBD kota Makassar) terkait masalah perlunya peran kinerja tata kelola bencana yang juga sebagai dinamisor di kota Makassar mengatakan bahwa:

“peran saya sebagai dinamisor menyiapkan bahan-bahan sebagai administrasi dalam pasca bencana dan memikirkan alat-alat dapur umum dan bantuan material berupa seng dan balok dengan bantuan rehabilitas sehingga masyarakat bisa dievakuasi dengan baik” (Hasil Wawancara “KH” 17 July 2018)

Setiap bencana rehabilitas sangat penting dalam tata kelola bencana banjir di Kota Makassar maka perlunya cepat dalam memikirkan alat-alat dapur dan mengrehab pasca bencana.

Lanjut wawancara dengan kepala PLT (Pernyataan PLT Kecamatan Manggala di kota Makassar) terkait masalah perlunya peran kinerja tata kelola bencana yang juga sebagai dinamisor di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami sangat merasakan dengan adanya peran BPBD, badan penanggulangan bencana daerah tiap tahun BPBD selalu melakukan sosialisasi dan melakukan bantuan seperti perahu karet, dapur umum, khususnya kecamatan Manggala Kota Makassar, karena setiap banjir selalu cepat dan stand by dalam mengevakuasi masyarakat sekitar, kami dari instansi pemerintah kecamatan Manggala hanya perpanjangan tangan dan bukan instansi teknis dan kita hanya penghubung dari instansi yang ada” (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Sosialisasi perlu ditingkatkan dan perlunya bantuan pemerintah untuk menutupi kekurangan fasilitas pada saat bencana banjir seperti perahu dan lain-lain

Lanjut wawancara dengan kepala PLT (Pernyataan PLT Kecamatan Manggala) terkait masalah tanggap kinerja tata kelola bencana yang juga sebagai dinamisor di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami dari instansi pemerintah kecamatan Manggala sangat berharap agar BPBD dapat meningkatkan kualitas pelayanan pasca bencana seperti perahu karet, dapur umum dan lebih cepat dalam mengevakuasi warga setelah sosialisasi ke warga khususnya yang terkena banjir (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Perlunya tingkatan dalam kualitas pelayanan dalam kerja sama BPBD dan perlunya komunikasi lebih awal sehingga barang-barang warga bisa cepat diamankan dan ditambahkannya bantuan baik dari dinas sosial maupun dari instansi BPBD.

Lanjut wawancara dengan kepala (PernyataanKelurahan Manggala) atau yang mewakili sekretaris Lurah terkait masalah peran kinerja tata kelola bencana yang juga sebagai dinamisator yang bekerja sama dengan pemerintah di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami sangat mengharapkan dengan adanya peran dinamisator untuk lebih meningkatkan pelatihan untuk kami sehingga setiap datangnya banjir kami selalu siap siaga dan kami berterimah kasih dengan bantuan BPBD Kota Makassar yang selalu memperhatikan wilayah kami setiap datangnya banjir (Hasil Wawancara “RS” 12 July 2018)

Perlunya adanya perbandingan dalam melakukan suatu peningkatan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan.

Lanjut wawancara dengan kepala (PernyataanKelurahan Manggala) atau yang mewakili sekretaris Lurah terkait masalah tanggapan kinerja tata kelola bencana yang juga sebagai dinamisator yang bekerja sama dengan pemerintah di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami sangat berterimah kasih dengan BPBD kota Makassar karena selalu siap siaga pasca bencana dan selalu mengevakuasi masyarkat yang terkena banjir dan selalu menambahkan fasilitas seperti, perahu dan melakukan pelaporan sebelum pasca bencana dan melakukan pelatihan (Hasil Wawancara “RS” 12 July 2018)

Perlunya BPBD dan pemerintah lebih memperhatikan lokasi bencana agar jauh sebelum bencana BPBD bisa cepat turun tangan dan memikirkan alat-alat yang dibutuhkan pada saat bencana.

Lanjut wawancara dengan kepala (Pernyataan Ketua posko penyaluran bantuan sekaligus RW Manggala) terkait masalah perlunya peran kinerja tata kelola bencana yang juga sebagai dinamisator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami disini sangat merasakan adanya peran BPBD karena mereka selalu berbaur adanya palang merah, bazarnas, team penanggulangan bencana dalam mengevakuasi masyarakat yang terkena banjir namun sebagian dari kami belum mengetahui adanya team penanggulangan bencana yang kami tau hanya bazarnas pasca bencana (Hasil Wawancara “M” 13 July 2018)

Perlunya penambahan team pada saat bencana dan perlunya kelengkapan pakaian seragam sehingga masyarakat bisa lebih tau bantuan apa yang turun pada saat bencana.

Lanjut wawancara dengan kepala (Pernyataan Ketua posko penyaluran bantuan sekaligus RW Manggala) terkait masalah perlunya tanggapan kinerja tata kelola bencana yang juga sebagai dinamisator di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya sebagai ketua posko sangat mengharapkan adanya tambahan perahu dan ditingkatkannya pelatihan pasca sebelum bencana karena di RW saya sudah membuat team untuk melakukan pelatihan pasca bencana namun yang menjadi harapan saya team dari BPBD bisa meningkatkan pelatihan pada anggota kami pada saat pasca bencana, dan saya kiranya sosialisasi BPBD bisa lebih ditingkatkan lagi dikarenakan sebagian anggota kami belum mengetahui team-team BPBD yang mereka tau itu hanya PMI dan bazarnas (Hasil Wawancara “M” 13 July 2018)

Pelatihan BPBD pada saat bencana sudah menjalankan tugasnya dan perlunya ditingkatkan lagi adanya pelatihan bagi warga.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait hubungan kerja sama BPBD pemerintah dengan masyarakat dalam peran serta tanggapan dalam menanggulangi bencana banjir di kota Makassar khususnya kecamatan Manggala

dan kelurahan Manggala maka BPBD selalu memberikan pengawalan pasca bencana sesuai dengan regulasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga bantuan yang berkordinasi dengan pemerintah setempat yang terkena bencana serta masyarakat kota Makassar khususnya kecamatan Manggala kelurahan manggala belum sepenuhnya kami bisa menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai pengelola Makassar BPBD, namun kami akan mencoba lagi pada saat pasca bencana, kota Makassar yang dilandai banjir tentunya sudah menjadi hal yang biasa namun kami dari BPBD selalu bekerja keras dengan menurunkan fasilitas yang ada, menurunkan bantuan PMI dan Bazarnas dan bantuan logistik pangan yang berdatangan 5 jam pasca bencana terjadi dan dibantu oleh sukarelawan baik obat-obatan maupun evakuasi ketempat posko penampungan yang mereka siapkan untuk masyarakat yang terkena banjir besar.

1. Hubungan Kerja Sama BPBD Dengan Pemerintah Dalam Peran Serta Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Makassar

Penanggulangan bencana akan terlaksana dengan baik apabila pihak pemerintah dan masyarakat maupun BPBD dalam pelaksanaannya dibarengi dengan prinsip kerja atau kewajiban yang harus dimiliki seseorang atau sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah kota Makassar dapat diharapkan memberikan solusi kepada Masyarakat khususnya di Kota Makassar kecamatan Manggala kelurahan Manggala, paling tidak memberikan peringatan dini ketika akan terjadi bencana banjir sehingga kerugian dapat diminimalisir

Untuk mengetahui hubungan kerja sama dengan pemerintah dalam peran serta menanggulangi bencana banjir di Kota Makassar dalam membantu Pemerintah dan masyarakat sebagai aktifitas pencarian penyelamatan dan pemberian bantuan kepada korban bencana dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut: pernyataan bapak Fadly selaku PLT kecamatan Manggala dalam kerja sama BPBD dan pemerintah terkait Masalah perlunya peran tata kelola bencana banjir di kota Makassar

Lebih lanjut wawancara dengan (pernyataan PLT kepala kecamatan Manggala) terkait masalah perlunya peran kinerja BPBD dan pemerintah tata kelola bencana di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya selaku PLT kecamatan Manggala berterimakasih dengan bantuan BPBD bisa lebih di tingkatkan lagi dengan memberikan kami kabar jauh sebelum pasca bencana sehingga saya bisa cepat membentuk posko dan mengumpulkan RW untuk membuat posko setiap RW yang ada di kecamatan Manggala dan lebih dulu mengevakuasi warga pasca sebelum bencana terjadi dan minindak lanjuti laporan ke PU sebelum bencana banjir sehingga ada waktu bagi kami dalam mengevakuasi korban” (Hasil Wawancara “AF” 13 July 2018)

Dalam bencana banjir perlunya komunikasi yang baik sebelum pasca bencana guna masyarakat bisa di selamatkan terlebih dahulu dengan mengantarkannya ke posko yang kami bentuk

Lebih lanjut wawancara dengan (pernyataan PLT kepala kecamatan Manggala) terkait masalah perlunya tanggapan kinerja tata kelola bencana di kota Makassar mengatakan bahwa:

“menurut kami dalam menanggulangi bencana banjir maka kami telah membuat posko tiap RW terkhusus yang terkena bencana banjir khususnya RW 8 yang sangat kerendahan tanah dan telah berjalan hampir setiap tahunnya terkena banjir dikarenakan waduk yang sementara diperbaiki dan sungai jekne madingin yang kami belum perdalam sehingga air selalu

menghampiri di wilayah yang tanahnya sangat rendah namun kami dari instansi pemerintah sudah melengkapi adanya peralatan dan logistik” (Hasil Wawancara “AF”, 11 July 2018)

Perlunya pemerintah dalam meningkatkan kondisi tanah yang sangat rendah, dan perlunya pemerintah dalam meningkatkan fungsi waduk dalam tata kelola bencana banjir

Lebih lanjut wawancara dengan (pernyataan Sselaku warga dan mantan RW Kelurahan Manggala) terkait masalah perlunya peran kinerja BPBD tata kelola bencana di kota Makassar mengatakan bahwa:

“Menurut kami peran BPBD cukup kami rasakan seperti bantuan logistic baru-baru ini tanggal 22 hari selasa kami sudah mendapatkan bantuan dari pihak BPBD seperti peralatan masak beras dan lain-lain adapun kinerja BPBD tiap datangnya banjir dalam bentuk pelatihan, dan perannya masih ada setelah banjir datang salah satu contoh, kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam usulan membuat waduk dan membersihkan selokan dan meningkatkan waduk namun belum berhasil dikarenakan masih dalam proses perbaikan”(Hasil wawancara “S”, 11 July 2018)

Setiap datangnya banjir perlunya ditingkatkan peran kerja sama pemerintah dalam meningkatkan fungsi waduk dan meningkatkan fasilitas bencana.

Lanjut wawancara dengan (pernyataan “S” selaku warga dan mantan Rw kelurahan Manggala) terkait masalah perlunya gerakan kinerja pemerintah tata kelola bencana di kota Makassar mengatakan bahwa:

“Menurut saya dalam tata kelola bencana banjir di Rw 8 cukup jelas bagi kami setiap datangnya banjir BPBD selalu menurunkan team-team dalam mengevakuasi warga-warga sekitar biasanya juga di berikan pelatihan baik itu BPBD dan instansi pemerintah” (Hasil wawancara “S”, 11 juli 2018.)

pemerintah dalam mengevakuasi warga harus ditingkatkan lagi dikarenakan warga selalu mendapatkan banjir kiriman baik itu dari bili-bili maupun sungai jekne berang dan adanya jembatan nipa-nipa yang sangat sempit sehingga setiap

lewatnya air,air selalu tinggal di daerah kami yang memiliki daerah dataran rendah.

Lanjut wawancara dengan (pernyataan “S” selaku warga dan mantan Rw kelurahan Manggala) terkait masalah perlunya tanggapan kinerja pemerintah tata kelola bencana di kota Makassar mengatakan bahwa:

“Menurut saya dalam menanggulangi bencana banjir dari instansi pemerintah sudah berusaha dalam meningkatkan waduk meskipun air pada umumnya tidak lari ke waduk, namun yang menjadi harapan kami kiranya sungai jekne madingin kalau bisa diperlebar lagi dan diperdalam sehingga kami tidak sering mendapatkan banjir kiriman, dan kami berterimah kasih kepada BPBD Kota makassar setiap datangnya banjir selalu melaporkan ke instansi pemerintah dan memberikan informasi kepada warga agar bisa lebih cepat dalam mengevakuasi barang-barang yang ada (Hasil Wawancara “S”,11 July 2018)

perlunya pemerintah meningkatkan waduk walaupun waduk itu belum berfungsi,maka perlunya tambahan dengan memperdalam sungai jekne madingin dan perlunya perluasan jembatan nipa-nipa sehingga banjir di manggala bisa di kurangi.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan“U” selaku warga RW 8 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah perlunya peran kinerja BPBD dan pemerintah tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“peran BPBD yang kami rasakan setiap datangnya banjir dari pihak BPBD selalu menurunkan bantuan baik itu dari rehabilitas dan logistik dan dari instansi pemerintah selalu mengevakuasi warga dan memberikan pelatihan agar dapat mengurangi banjir baik itu pembersihan dan melaporkan ke BPBD setiap datangnya hujan agar kiranya masyarakat bisa d evakuasi terlebih dahulu” (Hasil Wawancara “U” 11 July 2018)

Masyarakat sudah merasakan adanya bantuan pemerintah namun lambatnnya biasa informasi sehingga kami selalu diselamatkan terlalu lama dan banyaknya peralatan kami yang rusak diakibatkan banjir kiriman.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan “U” selaku warga RW 8 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah tanggapan kinerja BPBD dan pemerintahtata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kami rasakan BPBD sudah menjalankan tugasnya membantu kami untuk keluar dari rumah pasca bencana dengan menggunakan perahu dan mengantar kami ke mesjid atau ke posko penyaluran bantuan namun itu yang kami sesali banyak prabotan kami yang hanyut di karenakan air dan lambatnya turun tangan kepada masyarakat sehingga kami selalu terkena banjir setelah bantuan datang kami berharap instansi BPBD bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam memperdalamsungai jekne madingin dan memperlebar jembatan nipa-nipa sehingga kami tidak sering mendapatkan banjir kiriman (Hasil Wawancara “U” 11 July 2018)

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan “J” selaku warga RW 8 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah perlunya peran kinerja BPBD dan pemerintah tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“Sangat membantu bagi kami, terutama diwilaya saya yang selalu tenggelam karena datangnya banjir, peran BPBD di wilaya saya tentunya sangat bermanfaat karena kami selalu di evakuasi dengan perahu karet meskipun terkadang kami menunggu di atas atap rumah dikarenakan tingginya air yang tiada henti, bantuan berupa alat dapur memberikan peralatan-peralatan bagi setiap posko meskipun terkadang mengevakuasi terkadang agak lambat tetapi bantuan logistik dan peralatan setiap banjir selalu datang saya sebagai warga berharap kepada pemerintah agar jembatan sungai jekne madingin dan waduk bisa cepat di perbaiki dan sungai jekne madingin bisa di perdalam lagi (Hasil Wawancara”J” 11 July 2018)

perlunya solusi setiap datangnya banjir maka dalam memperluas sungai jekne madingin dan ditingkatkannya waduk sehingga dapat mengurangi banjir di kecamatan manggala.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan “J” selaku warga RW 8 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah perlunya tanggapan kinerja BPBD dan pemerintah tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“tanggapan saya selaku warga yang terkena banjir tentunya sangat mengharapkan agar BPBD dan pemerintah kecamatan Manggala bisa mencari solusi sehingga air itu tidak begitu lama tergenang diwilaya kami” (Hasil Wawancara “J” 12 July 2018)

pemerintah kecamatan manggala dalam meningkatkan pelayanan dan kerja sama, maka diharapkan pemerintah dan BPBD bisa mencari solusi agar banjir tidak begitu lama di wiayah kami seperti memperdalam sungai jekne madingin dan meningkatkan waduk.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan “N”selaku warga RW 8 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah perlunya Peran kinerja BPBD dan pemerintah tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya selaku warga yang merasakan cukup jelas dengan adanya bantuan dari BPBD baru-baru ini tanggal 22 hari selasa kemarin dengan memberikan kami bantuan logistic berupa makanan dan mengantarkan kami ke posko pengungsian dan tanggapan saya pemerintah kiranya bisa lebih perdalam lagi sungai jekne madingin sehinggak kami tidak mendapatkan banjir kiriman dari bili-bili tiap datangnya hujan”(Hasil Wawancara “N” 30 juni 2019)

Memperdalam sungai jek’ne madingin merupakan langkah dalam penanggulangan bencana banjir dan ditingkatkannya informasi dalam membawa warga ke posko sebelum bencana.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan “N”selaku warga RW 8 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah perlunya tanggapan kinerja BPBD dan pemerintah tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“Saya selaku Warga RW8 cukup puas dengan adanya bantuan BPBD namun Tanggapan saya perlunya pemerintah dalam mencari solusi agar banjir biasa berkurang dengan memperdalam sungai jekne madingin dan difungsikannya waduk sehingga kami bisa terhindar dari banjir kiriman”(Hasil Wawancara “N” 30 Juni 2019)

Adanya banjir kiriman tiap tahun maka pemerintah dapat memperhatikan sungai jek'ne madingin dan ditingkatkannya fungsi waduk sebelum pasca bencana.

Lanjut wawancara dengan (PernyataanKetua RT 06 AK RW8 RT 06 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah peran kinerja BPBD dan Pemerintah tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“Peran BPBD diwilayah kami cukup kami rasakan membawa kami ke posko memberikan bantuan logistic beras dan lain-lain, dari instansi pemerintah belum bisa kami rasakan karena pelebaran jembatan sungai jekne madingin belum bisa kami rasakan dan adanya waduk yang belum bisa difungsikan karena sementara perbaikan” (Hasil Wawancara “AK” 30 JUNI 2019)

Perlunya memperhatikan kondisi jalur air yang sangat sempit dengan memperlebar jembatan nipa-nipa dan ditingkatkannya fungsi waduk sehingga kami bisa terhindar dari bencana.

Lanjut wawancara dengan (PernyataanKetua RT 06 AK RW8 RT 06 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah peran kinerja BPBD dan Pemerintah tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya selalu Ketua RT tentunya berharap dengan adanya kerja sama pemerintah dan BPBD agar bisa mencari solusi sehingga kami terbebas dari banjir kiriman baik itu dengan difungsikan waduk maupun memperdalam sungai jekne madingin” (Hasil Wawancara “AK” 30 Juni 2019)

Setiap bencana banjir perlunya penggalian dari sungai jek'ne madingin dalam penanggulangan bencana banjir dan difungsikannya waduk sehingga bisa mengurangi banjir.

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan Ketua RW 11 M kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah peran kinerja BPBD tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“saya selaku RW tentunya sudah membentuk team untuk pasca bencana tetapi kami tidak pernah melakukan pelatihan khusus maka harapan kami dengan peran BPBD dapat melatih team kami paling tidak mencatat berapa korban pasca bencana, dan tentunya dari pihak mereka harus pintar dan jago berenang sehingga kami bisa d evakuasi dengan cepat, dan yang menjadi poin penting mereka bisa mengadakan pelatihan untuk wilaya yang terkena banjir dan melakukan pelebaran di sungai jekne madingin dan waduk kiranya cepat bisa diselesaikan” (Hasil Wawancara “M” 12 July 2018)

Lanjut wawancara dengan (Pernyataan Ketua RW 11 kota Makassar di kelurahan Manggala) terkait masalah tanggapan kinerja BPBD tata kelola bencana banjir di kota Makassar mengatakan bahwa:

“kita dari Rw 11 sangat mengharapkan dengan adanya bantuan dari BPBD bukanlah suatu kekurangan bagi kami yang terkena banjir seperti banjir tahun 2017 kami pernah di tanyakan masalah perahu yang kami gunakan, digunakan juga di wilaya sebelah maka masukan kami BPBD dapat menambah perahu dan fasilitas bagi yang terkena banjir namun bagi kami BPBD cukup menjalankan tugasnya dengan baik” (Hasil Wawancara “M” 12 July 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses penelitian kualitatif yang telah diterapkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Bencan Banjir Di Kota Makassar yaitu pemerintah Kota Makassar yang juga sebagai fasilitator regulator dan dinamisator yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebaiknya menyediakan system peringatan dini dan saling mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan yang memiliki sebagai fungsi a) fasilitator dengan mengotimalkan kinerja pemerintah yang bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan, b) regulator dengan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggara pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, c) dinamisator sebagai menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.
2. Upaya organisasi BPBD sebagai failitator, regulator dan dinamisator yang selalu berupaya untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakatsebelum dan sesudah terjadi bencana adalah analisis upaya yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan BPBD Kota Makassar

3. Kerja sama pemerintah dan BPBD yang juga sebagai fasilitator,regulator dan dinamisator dalam kerja sama kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir yang sudah ada yaitu sebagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masyarakat yang ikut juga dalam menjaga lingkungan kebersihan, agar tidak terjadi banjir yang begitu besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan:

1. Pemerintah dalam hal ini BPBD agar selalu konsisten dengan menjaga lingkungan dan badan bencana
2. Khusus Pemerintah daerah sebaiknya telah mengupayakan agar segera meningkatkan fungsi waduk dan penambahan aspal dalam menghindari bencana banjir yang dirasakan oleh warga, kerendahan tanah dan mengupayakan perda agar tidak terlalu fokus dengan keputusan pemerintah pusat mengingat setiap kecamatan-kecamatan dan kelurahan berbeda kondisi potensi bahaya bencana alam yang bisa terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhe Reza Rachmat & Adjie Pamungkas. 2014. *Faktor-Faktor Kerentanan Yang Berpengaruh Terhadap Bencana Banjir Di Kecamatan Manggala Kota Makassar*. Jurnal Teknik Pomits Vol. 3, No. 2, (2014) Issn: 2337-3539 (2301-9271print). [Http// ejurnal.its.ac.id](http://ejurnal.its.ac.id) > Home > Vol 3, No 2 (2014) > Rachmatdi akses 27 April 2018.
- Arief, Rosyidie. 2013. *Banjir Fakta dan Dampaknya,Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No. 3, Desember 2013.A Rosyidie - Journal of Regional and City Planning, 2013 - journals.itb.ac.id. di akses pada tanggal 29 april 2018
- Barokah, Restu Putri 2015. *Perencanaan Konstruksi Pelindung Tebing SungaiSebagai Upaya Penanganan Longsor Akibat Banjir DiBelokan Sungai*. Skripsi. Jurusan Teknik SipilFakultas Teknik Universitas LampungUniversitas LampungBandar Lampung
- Dault, Adhyaksa. 2012. *Menghadang Negara Gagal Sebuah Ijtihad Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa*. Jakarta: Renebook
- Donna, 2011. *Tata Kelola Bencana: Sebelum Dan Sesudah Kejadian Bencana*. Gaya Media, Yogyakarta
- djafar irfan muhammad.2011.*Pengaruh Penyuluhan Tentang Kesiapsiagaan Bencana Banjir Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Kepala Keluarga Di Desa Romang Tangaya Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar*.SkripsiT Makassar - 2011 - Pasca. Universitas Unhas
- Fanni, Harliani. 2014. *Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung Tentang Rencana Relokasi Akibat Bencana Banjir*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. ISSN 0853-9847 2014 SAPPK ITB. F Harliani - Journal of Regional and City Planning, 2014 - journals.itb.ac.id. diakses pada tanggal 29 april 2018
- Hardoyo su rito. Dkk. 2016. *Aspek Sosial Banjir Genangan (ROB) Di Kawasan Pesisir*. Yogyakarta: renobook
- Inne Septiana Permatasari. 2012. *Strategi Penanganan Kebencanaan Di Kota Semarang (Studi Banjir Dan Rob)*. [http//IS Permatasari, H Nurcahyanto... - Journal of Public Policy ...](http://ISPermatasari,HNurcahyanto...-JournalofPublicPolicy...), 2012 - ejournal3.undip.ac.id. di akses pada tanggal 29 april 2018.
- Kadir, Abdul. 2016. *Analisis Pengelolaan Kawasan Rawan BanjirBerkas Zonasi Di Kabupaten Pangkep*. Skripsi. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan KotaFakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar.

- Lili, Somantri. 2016. *Pemanfaatan Teknik Penginderaan Jauh Untuk Mengidentifikasi Kerentanan Dan Risiko Banjir*. [http://L.Somantri - Jurnal Geografi Gea, 2016 - ejournal.upi.edu](http://L.Somantri-JurnalGeografiGea,2016-ejournal.upi.edu). di akses pada tanggal 30 april 2018.
- Ligal Sebastian. *Pendekatan Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir*. Volume 8, Nomor 2, Juli 2008. [http// L Sebastian - Dinamika Teknik Sipil, 2008 - academia.edu](http://LSebastian-DinamikaTeknikSipil,2008-academia.edu). di akses pada tanggal 29 april 2018
- Marhady. Andi Ikmal. 2014. *Analisis Dan Pemetaan Daerah Rawan Banjir Di Kota Makassar Berbasis Spatial*. Skripsi. Jurusan Sipil Fakultas Teknik. Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/.../1/15.%20TUGAS%20AKHIR%20ok.pdf> di akses tanggal 27 April 2018.
- Muh. Marfai. Aris. 2018. *Banjir Pesisir: Kajian Dinamika Pesisir Semarang*. Semarang: Reno Book
- Muluyani dwi, Dkk. 2014. *Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografis Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nasyiruddin, Muhammadiyah Muhammad Yusuf Badjido. 2015. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.V No.2 Oktober 2015 [Http// Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Otoritas/Article/View/121](Http://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Otoritas/Article/View/121) diakses pada Tanggal 29 April 2018.
- Nurlianti, dkk. 2017. *Pemetaan Bahaya Banjir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar*. JPG (Jurnal Pendidikan Geografi). Volume 4 No 5 September 2017 Halaman 40-52. e-ISSN : 2356-5225. N Nurlianti, R Kumalawati... - JPG ([http//Jurnal Pendidikan ..., 2017 - ppjp.unlam.ac.id](http://JurnalPendidikan...,2017-ppjp.unlam.ac.id) di akses pada tanggal 29 april 2018
- Rismawati.dkk. 2015. *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Manggala Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 Nomor 2. [http//Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kolaborasi/Article/Download/698 /656](http://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kolaborasi/Article/Download/698/656). diakses Pada Tanggal 28 April 2018
- Rangga Chandra K dan Rima Dewi Supriharjo. 2013. *Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Jakarta Utara*. Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print). [http//RC Karana, R Suprihardjo - Jurnal Teknik ITS, 2013 - ejurnal.its.ac.id](http//RCKarana,RSuprihardjo-JurnalTeknikITS,2013-ejurnal.its.ac.id). diakses pada tanggal 29 april 2018

- Rismawati. 2015. *Peraturan Walikota Makassar No 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*. Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015. Volume 1 Nomor 2. [Http//Rismawati, J Usman, A Ma'ruf - Kolaborasi: Jurnal ..., 2017 - Journal.Unismuh.Ac.Id](http://Rismawati,J_Usman,A_Ma'ruf-Kolaborasi:Jurnal...,2017-Journal.Unismuh.Ac.Id). Diakses Tanggal 29 April 2018.
- Sidharta Adyatma dkk 2017. *Pemetaan Bahaya Banjir di Kecamatan Martapurakabupaten Banjar*. (Jurnal Pendidikan Geografi). Volume 4 No 5 September 2017 Halaman 40-52. e-ISSN : 2356-5225. <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jpg/article/download/.../3557> di akses tanggal 29 april 2018.
- Sari, Diana. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. [http//D Sari - 2013 - repository.widyatama.ac.id](http://D_Sari-2013-repository.widyatama.ac.id). di akses pada tanggal 1 mei 2018.
- Syah Achmad Fachruddin. 2012. *Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Bangkalan Terhadap Dampak Banjir Rob Akibat Perubahan Iklim*. Jurnal Kelautan, Volume 5, No.2 Oktober 2012. ISSN : 1907-9931. [AF Syah - Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine ..., 2012 - infestasi.trunojoyo.ac.id](http://AF_Syah-Jurnal_Kelautan:Indonesian_Journal_of_Marine...,2012-infestasi.trunojoyo.ac.id). di akses pada tanggal 29 april 2018
- Suwarno Fajrin Rizkia Pratiwi. 2014. *Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Fokus Pada Proses Manage Relationship (Apo08) Studi Kasus: Pt Oto Multiartha*. [FRP Suwarno - 2014 - repository.uinjkt.ac.id](http://FRP_Suwarno-2014-repository.uinjkt.ac.id) di akses pada tanggal 29 april 2018
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit cv. Alfabeta: bandung
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit cv. Alfabeta: bandung
- _____. 2015. *Metode Penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Penerbit cv. Alfabeta: bandung
- Rutanaji, Dicky. 2013. *Sebagai Metode Alternatif Bagi Perancangan Tata Kelola Keamanan Informasi Sebuah Usulan Untuk Diterapkan di Arsip Nasional RI. ISO 27001*. [http//D Rutanaji, SS Kusumawardani Seminar Nasional 2018 journal.sttnas.ac.id](http://D_Rutanaji,SS_Kusumawardani_Seminar_Nasional_2018_journal.sttnas.ac.id) di akses pada tanggal 1 mei 2018.
- Yulaelawati, Ella. 2008. *Mencerdasi bencana banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung api*. Jakarta: reno book

Undang-undang

Undang-undang no 24 tahun 2007. tentang penanggulangan bencana.

Peraturan Walikota. *Peraturan Walikota Makassar No 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*



LAMPIRAN

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Warga RW 8 Kelurahan Manggala



Warga Kelurahan Manggala



Sekretaris Lurah Manggala



Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi



PLT Kecamatan Manggala



RW Kelurahan Manggala



Kepala Kedaruratan Dan Logistik



Jalanan Langanan Banjir



KETUA RT 6 RW 8 Kel. Manggala



Ibu Nur RW 8



Ibu Hartati RW8

KONDISI BANJIR RW 8 Kel. Manggala









Bantuan BPBD Kel. Manggala



KONDISI AIR SURUT RW 8 Kel. Manggala



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Makassar

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, maka stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terdiri dari 1(satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex-officio), 1(satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIb, 1(satu) Sekretaris, 3(tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIb dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa. Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik.

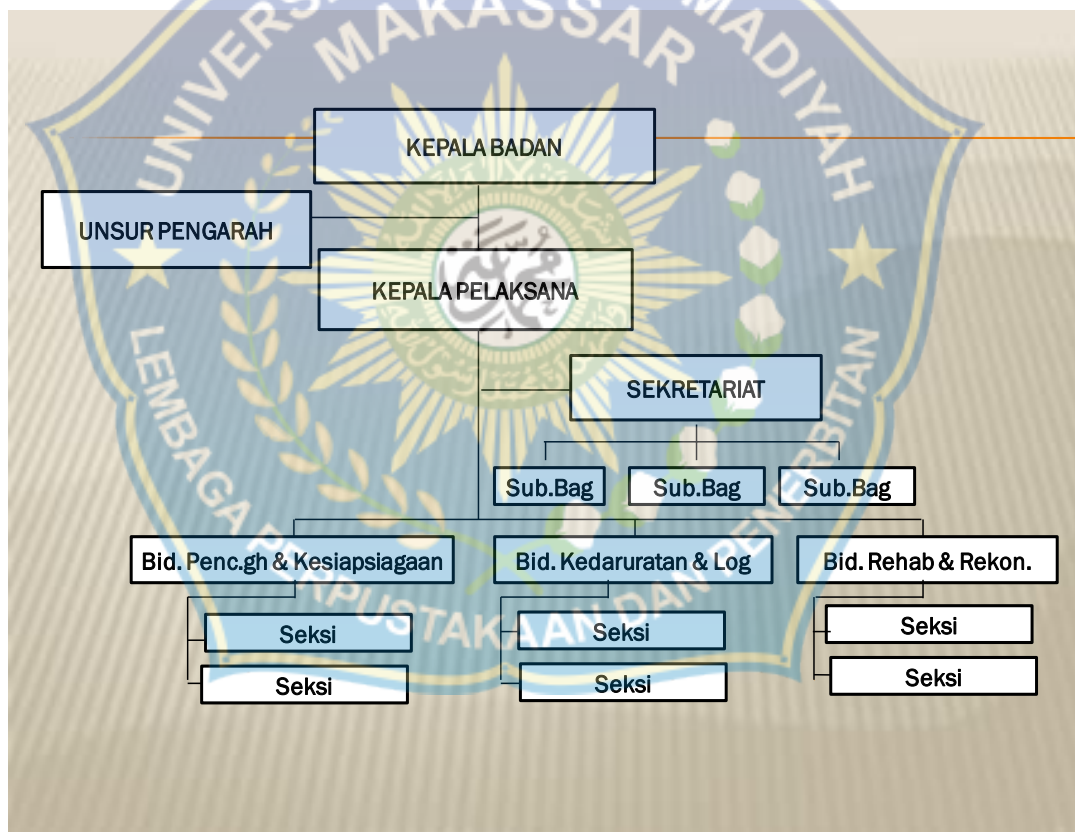
d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, terdiri dari :

a. Kepala Badan (Eselon IIa) 1 orang

- b. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIIb) 1 orang.
- c. Sekretaris (Eselon IIIb) 1 orang
- d. Kepala Bidang (Eselon IIIb) 3 orang
- e. Tim Pengarah (Non Eselon)
- f. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa) 9 (sembilan) orang.
- g. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada gambar 1. berikut ini



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar.

Melalui pengembangan kapasitas Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha, maka diharapkan agar pada masing-masing sektor dan lembaga masyarakat dapat menunjukkan peranannya secara nyata yang bersinergi dilapangan, dan untuk

mencapai hal itu, maka tersedianya perangkat kebijakan operasional, adanya koordinasi antar sektor, adanya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat yang bersinergi serta tingginya partisipasi masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman bencana merupakan kondisi yang diinginkan dalam penanganan penanggulangan bencana.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, telah ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Organisasi sebagai berikut :

2. Kedudukan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara ex-officio oleh Sekeretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pelaksanaan tugas sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

3. Tugas Pokok

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maka BPBD Kota Makassar mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanganan penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanganan penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanganan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana daerah;

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi Badan BPBD

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk arahan Walikota Makassar.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, juga melekat Fungsi sebagai Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Dan untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur pengarah

Unsur pengarah mempunyai fungsi :

- 1) Membantu menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- 2) Membantu memantau dan;
- 3) Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- 2) Koordinasi;
- 3) Komando;
- 4) Pelaksana dalam penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana daerah.

c. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- 5) Koordinasi;
- 6) Komando;
- 7) Pelaksana dalam penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana daerah.

Telahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Kota Makassar

Bentuk Telahan dan keterkaitan antara Renstra BNPB dan Renstra BPBD Kota Makassar

Visi dan Misi BNPB

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Adapun Visi BNPB yaitu : Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana sedangkan Misi yaitu :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko,
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal,
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh

Visi - Misi BPBD Kota Makassar

1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Makassar “Terwujudnya Kota Makassar Tangguh Terhadap Bencana Menuju Kota Dunia”.

2. Misi Badan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Makassar

1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Mengembangkan kapasitas Penanggulangan bencana yang handal cepat, tepat, akurat, dan menyentuh masyarakat.
3. Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana.

RIWAYAT HIDUP



Renaldi Anas, lahir di Makassar pada tanggal 18 July 1996 anak ketiga dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Drs M Anas Lanno dan Andi Hj Astuti Mappangara.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD NEGERI INPRES PERUMNAS I mulai tahun 2002 sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP HARAPAN BHAKTI dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan berhasil menamatkan studinya di sekolah tersebut pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur seleksi penerimaan pendidikan menengah atas di SMA HARAPAN BHAKTI MAKASSAR selama 3 tahun dan Mahasiswa baru (SPMB) di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan berhasil diterima di jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (SOS-POL) Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program studi strata 1 dan alhamdulillah pada tahun 2019 penulis telah berhasil menyelesaikan studinya dengan tugas akhir yang berjudul **“Tata Kelola Bencana Banjir Di Kota Makassar”**.